

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018 – 2023
(Perubahan)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2021

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Perubahan Pertama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2018-2023 telah diselesaikan untuk memperbaiki / menyesuaikan hal-hal yang kurang sesuai dengan keadaan saat ini. Perubahan Renstra dilakukan sebagai adanya penyesuaian terhadap perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023 serta adanya Pandemi COVID19. Bila masih diperlukan, akan dilakukan Reviu berikutnya untuk memperbaiki atau menyesuaikan hal-hal yang kurang sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Renstra hasil perubahan ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di Dinas Perikanan dan Peternakan untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2021-2023.

Penyusunan Perubahan Renstra ini berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumedang di bidang Perikanan dan Peternakan Tahun 2021-2023 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan peternakan di Kabupaten Sumedang.

Akhirnya, semoga Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang 2018-2023 ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Sumedang, Desember 2021
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN SUMEDANG,


H. NANDANG SUPARMAN, S.Sos.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650920 198603 1 012

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Landasan Hukum.....	12
1.3 Maksud dan Tujuan.....	15
1.4 Sistematika Penulisan.....	17
1.5 Keterkaitan Dinas Perikanan dan Peternakan dengan RPJMD.	19
BAB 2 GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan	
2.1.1 Tugas.....	20
2.1.2 Fungsi.....	20
2.1.3 Struktur Organisasi.....	21
2.2 Sumber Daya Manusia	23
2.2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	23
2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	24
2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	24
2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	25
2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	26
2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan...	27
2.2.7 Sarana dan Prasarana.....	27
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan.....	29
2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Perikanan dan Peternakan.....	32
BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	42
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	44
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi.....	47
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Provinsi Jawa Barat.....	47
3.5 Isu-Isu Strategis.....	61
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.....	65
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang	68
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Peternakan.	69
5.1.1 Strategi.....	71
5.1.2 Arah Kebijakan.....	72
	73

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	78
6.2 Pendanaan	87
BAB 7 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	150
BAB 8 PENUTUP.....	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Periode 2018 - 2023.....	11
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	19
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	23
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	24
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	25
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	26
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	27
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	27
Tabel 2.7	Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Tahun 2021.....	28
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Periode 2019 – 2020	30
Tabel 2.9	Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan	31
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	43
Tabel 3.2	Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2019 – 2023.....	46
Tabel 3.3	Telaahan Renstra Kementerian, Provinsi.....	47
Tabel 3.4	Isu Strategis dalam Bidang Perikanan dan Peternakan.....	62
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Peternakan.....	67
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang	68
Tabel 5.1	Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal.....	70
Tabel 5.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	75
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif.....	88
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan yang mengacu pada Sasaran RPJMD.....	150

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (Lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan Program Pembangunan Daerah yang berisi Program Prioritas terpilih. Renstra sendiri berfungsi sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka di Pemerintahan Daerah harus ikut menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Selanjutnya pada tahun 2020, dunia dilanda pandemi COVID19, begitu juga dengan Indonesia, yang sampai saat ini masih belum selesai. Pandemi COVID19 telah merubah berbagai tatanan kehidupan.

Berdasarkan kondisi yang terjadi tersebut, maka telah dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan menyesuaikan terhadap keadaan yang terjadi. Dengan berubahnya RPJMD maka Renstra Dinas juga harus ikut menyesuaikan dengan perubahan ketentuan dan kondisi yang ada.

Secara umum, proses penyusunan Perubahan Renstra yang dilakukan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan,

tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional dan provinsi sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat. Adapun tahapan penyusunan Renstra meliputi :

- (a) Persiapan penyusunan Perubahan Renstra;
- (b) Penyusunan rancangan Perubahan Renstra;
- (c) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra; dan
- (d) Penetapan Perubahan Renstra.

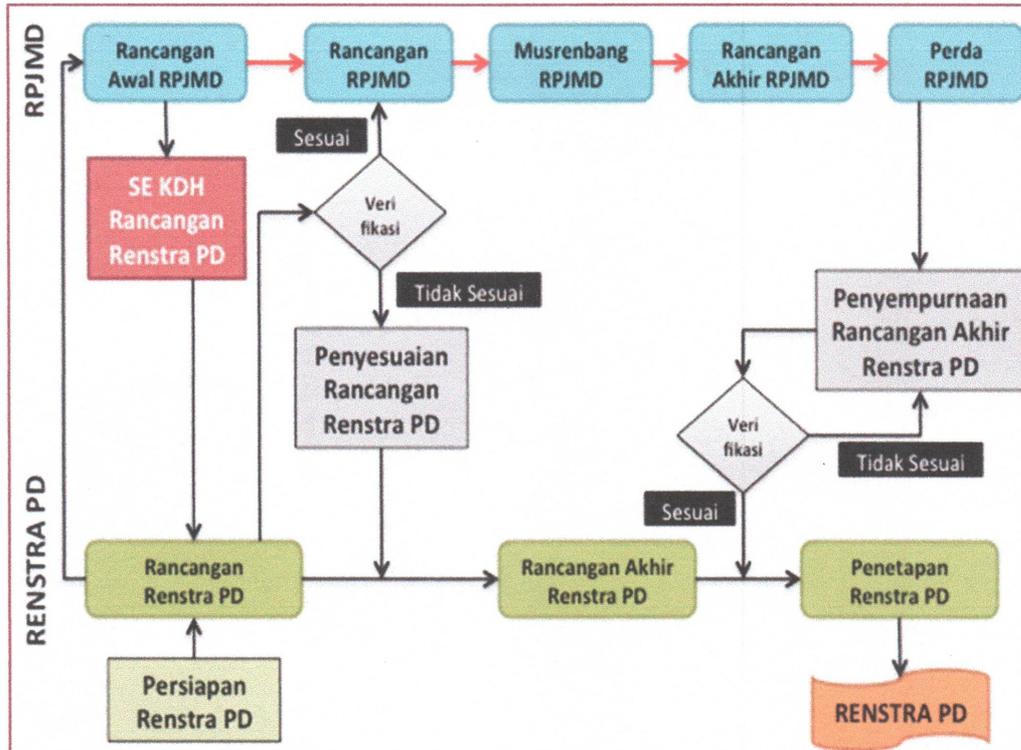
Pada proses penyusunan Rancangan Perubahan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 3 (tiga) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Perubahan Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan tujuan, sasaran, program, kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Perubahan Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran daerah sebagaimana ditetapkan Perubahan RPJMD. Sehingga tujuan,

sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada Perubahan RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan sektor Perikanan dan Peternakan yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Perubahan Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Adapun bagan alir penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan yang dimulai dari penyusunan rancangan Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan sampai dengan penetapan Perubahan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1. sebagai berikut :



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023

Dengan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Periode 2018-2023 maka Dinas Perikanan dan Peternakan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di bidang Perikanan dan Peternakan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Dinas Perikanan dan Peternakan dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719)
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/MenLHK-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
28. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Periode 2018 – 2023
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
30. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
31. Peraturan Bupati Nomor .. Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sumedang pada periode 2018-2023, melalui

- tujuan dan sasaran Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan;
- b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka tiga tahun ke depan;
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun yang akan datang;
 - d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Sumedang.
 - e. Memudahkan dalam mengukur pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

1.3.2 Tujuan

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Perikanan dan Peternakan untuk kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan;
- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Dinas Perikanan dan Peternakan; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Peternakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan;
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan dan Peternakan
- 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

Bab III Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 5 (lima) subbab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan

hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis :

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan dan Peternakan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan tiga tahun mendatang.

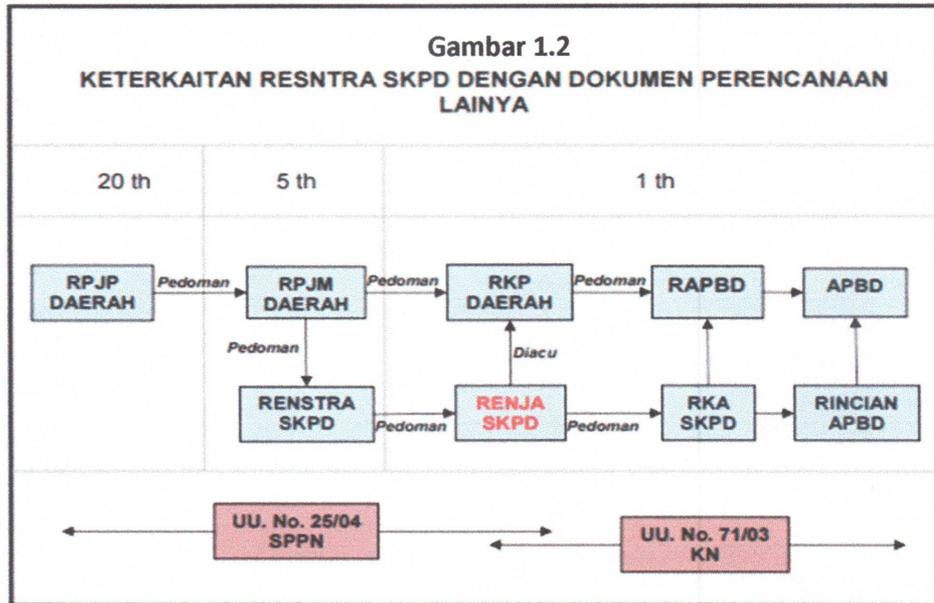
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Perubahan RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Lampiran-Lampiran

1.5 Keterkaitan Perubahan Renstra dengan Perubahan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar di atas, hubungan dan keterkaitan antara dokumen Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan tidak terlepas dari dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran tahunan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

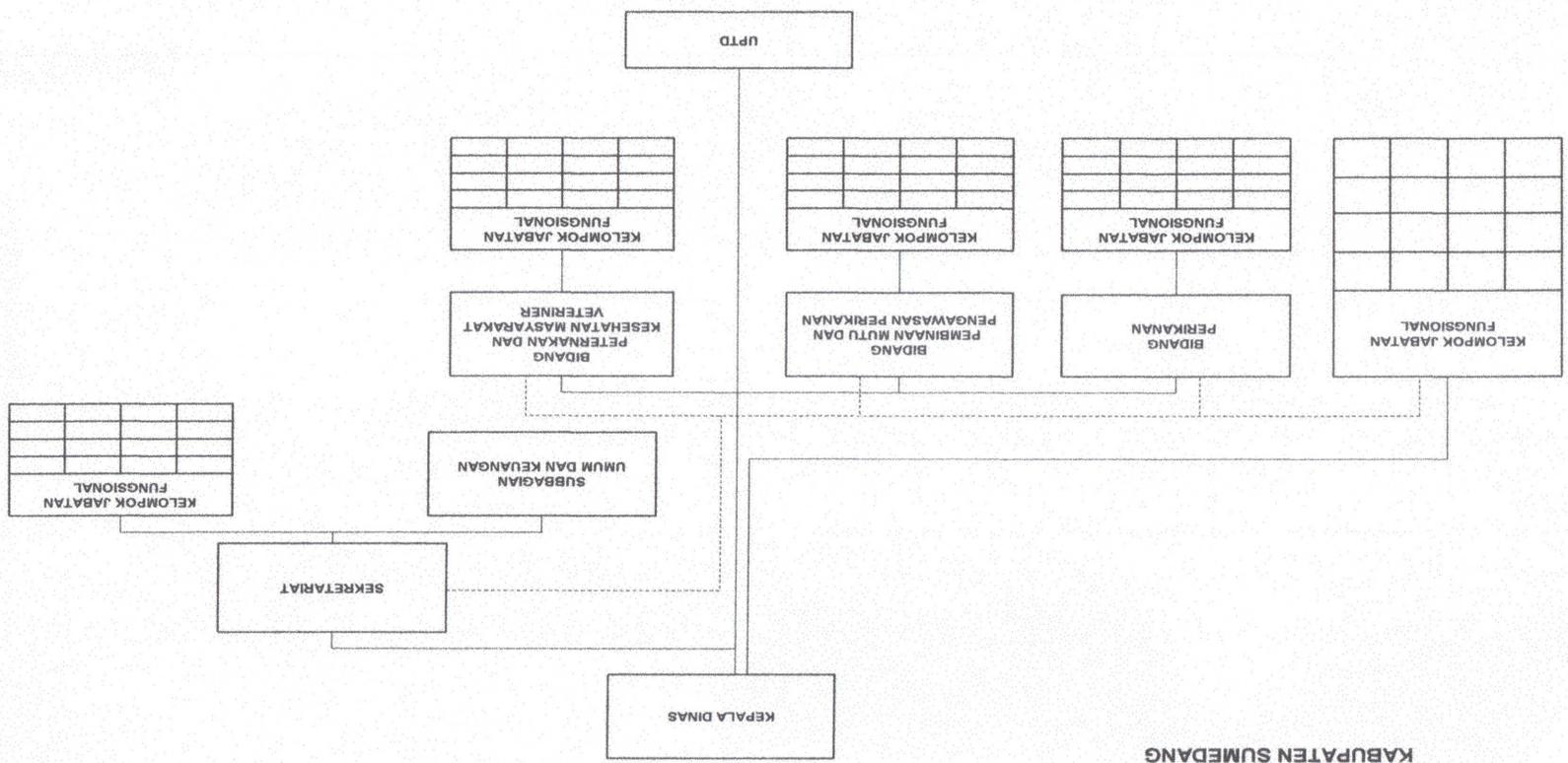
2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan

Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perikanan, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD Perikanan dan Peternakan, UPTD Balai Benih Ikan, UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Pembibitan Ternak dan UPTD Pasar Hewan).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana gambar di bawah ini :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN SUMEDANG**



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang

2.2 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Bulan Desember tahun 2021, jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 59 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1, jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan paling banyak berada di kelompok umur di atas 50 tahun yaitu sebanyak 31 orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah berumur di atas 36-40 tahun, yaitu sebanyak 2 orang. Dinas Perikanan dan Peternakan tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-25 dan 26-30.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	-	1	-	-	2	9	12
2	Bidang Peternakan	-	-	-	2	-	-	3	5
3	Bidang Perikanan	-	-	-	-	-	2	1	3
4	Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan	-	-	1	-	1	-	3	5
5	Unit Pelaksana Teknis Dinas	-	-	1	-	7	11	15	34
TOTAL		-	-	3	2	8	15	31	59

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai adalah mereka yang menempati golongan III yaitu sebanyak 39 orang atau persinya 66,10 % dari seluruh total pegawai. Sedangkan selebihnya merupakan pegawai golongan II sebanyak 10 (16,94 %) orang, golongan IV sebanyak 10 (16,94 %).

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	7	3	12
2	Bidang Peternakan	-	-	3	2	5
3	Bidang Perikanan	-	0	3	0	3
4	Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan	-	1	2	2	5
5	Unit Pelaksana Teknis Dinas	-	7	24	3	34
TOTAL		-	10	39	10	59

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 29 (49,15 %) orang sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 16 (27,12 %) orang, Diploma sebanyak 6 (10,17 %) orang dan S2 sebanyak 8 (13,56 %) orang. Dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan didominasi oleh mereka yang

berpendidikan SMA dan S1, sebanyak 45 orang atau 76,27 %. Sehingga, dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan sudah cukup memadai. Namun demikian, masih perlu upaya pengembangan kapasitas pegawai khususnya peningkatan pendidikan dari SMA ke S1 dan dari S1 ke S2. Jumlah pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	4	1	6	1	12
2	Bidang Peternakan	-	1	2	2	5
3	Bidang Perikanan	-	-	2	1	3
4	Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan	1	-	2	2	5
5	Unit Pelaksana Teknis Dinas	11	4	17	2	34
TOTAL		16	6	29	8	59

Sumber : Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 39 jabatan struktural. Saat ini jabatan telah terisi sebanyak 37, karena sebanyak 2 orang pejabat struktural eselon 4 telah memasuki masa pensiun, sehingga pegawai Dinas

Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 37 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 sedangkan sisanya adalah fungsional pelaksana. Sementara untuk jabatan fungsional (Penyuluh Perikanan) sudah menjadi kewenangan pusat sehingga tidak ada jabatan fungsional di Dinas Perikanan dan Peternakan.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	32
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	22
TOTAL		59

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan berjenis kelamin perempuan berjumlah 16 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 43 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	5	7	12
2	Bidang Perikanan	1	2	3
3	Bidang Peternakan	-	5	5
4	Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan	4	1	5
5	Unit Pelaksana Teknis Dinas	6	28	34
6	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
TOTAL		16	43	59

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.7 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 70,27 persen laki-laki menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV Sedangkan sisanya sebanyak 29,73 persen adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon III dan eselon IV.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	1	3	4
3	Eselon IV	10	22	32
TOTAL		11	26	37

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2.2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan dan Peternakan

Di samping Sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perikanan dan Peternakan.

Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Perikanan dan Peternakan dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum Aset khususnya asset tetap maupun asset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.8. berikut ini:

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2021

No.	Jenis Aset/ Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	6	5	1	
2.	Kendaraan roda 2	73	67	6	
3.	Peralatan kantor	717	693	24	
4.	Buku Perpustakaan	1	0	1	Set

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas menunjukkan bahwa data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang masih belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya adalah sarana dan prasana dalam mendukung fungsi utama serta fasilitas perkantoran.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

Gambaran kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan pada periode Tahun 2019 – 2020 sebagaimana terinci pada table 2.9. di bawah ini:

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Periode 2019 – 2020

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rumus Perhitungan Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal (2018)	2019			2020			
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				%	2,32	4,00	2,34	58,50	4,60	3,48	75,65
	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan:	Jumlah produksi ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan yang tercatat									
		1. Ikan Konsumsi		Ton	8.286	8.617	9.020	104,67	9.014	9.269	102,83	
		2. Ikan Hias		Ekor	612.470	636.969	642.085	100,80	666.269	670.553	100,64	
	3. Benih Ikan	Ribu Ekor	179.275	186.446	193.227	103,64	195.023	197.969	101,51			
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah unit pengolahan dan pemasaran perikanan yang terbina	Jumlah unit pengolahan dan pemasaran perikanan yang terbina	Unit	45	48	48	100,00	52	52	100,00		
Program kesehatan lingkungan ikan dan konservasi	Persentase kelestarian lingkungan budidaya perikanan	Terpantaunya lingkungan budidaya ikan dan konservasi	Persen	100	100	100	100,00	100	100	100,00		
Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan	URUSAN PERTANIAN					6,48	4,30	4,18	97,21	4,90	5,78	117,96
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Persentase pengendalian penyakit hewan	Persentase pengendalian Penyakit Hewan	persen	100	100	100	100,00	100	100	100,00	
	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jaminan keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Pengujian sampel bahan pangan asal hewan	Persen	100	100	100	100,00	100	100	100,00	
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak:	Jumlah populasi ternak yang tercatat									
		1. Sapi potong			Ekor	29.783	31.064	30.458	98,05	32.586	34.915	107,15
		2. Sapi perah			Ekor	4.149	4.327	4.028	93,08	4.539	3.703	81,57
		3. Kambing			Ekor	27.957	29.159	29.220	100,21	30.588	36.913	120,68
		4. Domba			Ekor	111.324	116.111	97.750	84,19	121.800	95.135	78,11
		5. Ayam buras			Ekor	519.506	541.845	530.031	97,82	568.395	612.943	107,84
		6. Ayam ras petelur			Ekor	111.883	116.694	93.482	80,11	122.412	542.778	443,40
		7. Ayam ras pedaging			Ekor	2.866.495	2.989.754	2.496.850	83,51	3.136.252	2.580.280	82,27
	8. Itik	Ekor			49.553	51.684	104.887	202,94	54.216	81.393	150,13	
	Jumlah produksi peternakan:	Jumlah produksi peternakan yang tercatat										
	1. Daging	Ton	15.474	16.139	22.987	142,43	16.930	22.385	132,22			
2. Telur	Ton	1.639	1.709	1.870	109,39	1.793	6.759	376,89				
3. Susu	Ton	12.323	12.853	11.978	93,19	13.483	8.619	63,92				
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina	Unit	75	84	68	80,95	100	104	104,00		

Tabel 2.9 Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)		REALISASI (Rp.)		REALISASI (%)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.056.608.529,00	8.330.975.846,90	7.643.758.597,00	7.705.700.151,00	84,40	92,49
B	BELANJA LANGSUNG	6.397.541.300,00	14.233.880.386,00	5.843.056.045,00	12.517.577.479,00	91,33	87,94
1	URUSAN WAJIB / ADUM	1.308.097.300,00	1.673.125.950,00	1.238.629.095,00	1.596.546.297,00	94,69	95,42
	Program Administrasi Perkantoran	640.907.300,00	684.490.500,00	604.934.508,00	659.133.180,00	94,39	96,30
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	473.190.000,00	884.112.750,00	453.188.637,00	849.990.417,00	95,77	96,14
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100.000.000	-	90.275.950,00		90,28	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	2.100.000,00	-	2.000.000,00	-	95,24
	Program Fasilitasi Pindah Tugas / Purna Tugas PNS	5.000.000	-	5.000.000,00	-	100,00	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.500.000	-	7.500.000,00	-	100,00	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	46.000.000,00	69.100.000,00	42.230.000,00	52.850.000,00	91,80	76,48
	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	26.000.000,00	33.322.700,00	26.000.000,00	32.572.700,00	100,00	97,75
	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	9.500.000,00	-	9.500.000,00	-	100,00	-
2	URUSAN PILIHAN	5.089.444.000,00	12.560.754.436,00	4.604.426.950,00	10.921.031.182,00	90,47	86,95
	Program Peningkatan Produksi Perikanan	1.800.319.000,00	2.167.249.520,00	1.622.630.150,00	1.898.011.300,00	90,13	87,58
	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	-	146.190.000,00	-	145.840.400,00	-	99,76
	Program Kesehatan Lingkungan Ikan dan Konservasi	-	236.786.672,00	-	229.219.152,00	-	96,80
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	94.790.000,00	133.830.000,00	80.493.350,00	120.150.000,00	84,92	89,78
	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	94.790.000,00	47.390.000,00	85.667.000,00	41.042.500,00	90,38	86,61
	Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	2.971.860.000,00	9.187.719.994,00	2.694.266.450,00	7.850.394.580,00	90,66	85,44
	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	127.685.000,00	641.588.250,00	121.370.000,00	636.373.250,00	95,05	99,19
	JUMLAH	15.454.149.829,00	22.564.856.232,90	13.486.814.642,00	20.223.277.630,00	87,27	89,62

Dari table 2.9., terlihat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan 2019 – 2020, untuk urusan perikanan mengalami kenaikan, sedangkan untuk urusan peternakan dan kesehatan hewan ada yang mengalami kenaikan, penurunan dan ada yang tetap. Untuk perikanan disebabkan sudah makin bagusnya pengelolaan budidaya dan sudah ada hasil dari tangkapan Waduk Jatigede yang berkontribusi ke peningkatan produksi ikan konsumsi. Sedangkan untuk peternakan, hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor diantaranya: harga produk peternakan di pasaran khususnya yang relatif kurang ekonomis mengakibatkan daya beli masyarakat menurun yang mengakibatkan jumlah produksi menurun. Selain itu animo masyarakat untuk beternak semakin menurun karena faktor usia dan harga jual produknya kurang begitu sebanding dengan biaya produksi, seperti halnya dalam pemeliharaan sapi perah. Kondisi fluktuatifnya capaian perikanan dan peternakan merupakan gambaran masih rendahnya produktivitas perikanan dan peternakan di Kabupaten Sumedang.

2.4. Tantangan dan Peluang Dinas Perikanan dan Peternakan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perikanan dan Peternakan menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Perikanan dan Peternakan dalam menciptakan berbagai kebijakan dan pelayanan dalam bidang Perikanan dan Peternakan yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Sumedang, diperlukan perencanaan yang tepat, efektif dan berkesinambungan. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Dinas Perikanan dan Peternakan harus mampu menjawab tantangan dan peluang yang ada dengan memperkuat berbagai aspek yang terkait dengan peran dan fungsinya. Dengan demikian, pembangunan bidang pekerjaan Dinas Perikanan dan Peternakan yang dihasilkan dapat berguna dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu masyarakat Kabupaten Sumedang yang adil, makmur dan sejahtera.

Adapun tantangan dan peluang Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang sesuai dengan perubahan dalam 3 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

2.4.1. Peluang

1. Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan.

Setiap kebijakan tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya dukungan peraturan perundang undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang diantaranya adalah:

- UU No, 18 tahun 2012 tentang Pangan;
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
- UU No. 41 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.;
- PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan;
- PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- Permentan No. 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
- PP No. 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- PP No.6 Tahun 2013 tentang pemberdayaan peternak;
- Perpres No. 48 tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan;
- Permentan No. 341/Kpts/OT.140/10 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
- Perpres No. 48 tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat ;

- Permentan No. 13/Permentan/PK,240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan;
- Permentan No. 26 Tahun 2017 tentang penyediaan dan peredaran susu;
- Kepmentan No.1312/Kpts/KP.340/12/204 tentang pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
- Peraturan Mentan No. 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang syarat, tata cara dan SOP pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal,
- Kepmentan No. 404/kpts/OT.210/6/2002 tentang pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan.
- Keputusan Mentan No. 3283/Kpts./IP.310/P/04/2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi pasar komoditas peternakan;
- PP NO. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719).

2. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi vertikal;

Suatu sistem kinerja pemerintahan tidak terlepas dari salah satu fungsi manajemen organisasi diantaranya saja adalah fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi dilakukan dalam rangka proses sinergitas untuk pencapaian tujuan organisasi agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Koordinasi dilakukan baik dengan berbagai instansi horizontal maupun vertikal. Instansi vertikal yang berada diatas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang diantaranya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Sementara instansi vertikal lainnya yakni: Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dan Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan.

3. Adanya potensi pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung produktivitas perikanan dan peternakan

Berbagai pemanfaatan teknologi yang mendukung produktivitas perikanan dan peternakan diantaranya saja: teknologi penanaman hijauan pakan ternak yang berkualitas baik, seperti tanaman indigofera sebagai sumber protein pengganti pakan konsentrat, teknologi Inseminasi Buatan untuk meningkatkan kualitas bibit ternak, teknologi Pengolahan Pakan Ternak untuk meningkatkan kualitas pakan dan menjaga ketersediaan pakan sepanjang tahun dan

teknologi pemasaran dengan memanfaatkan media sosial. Dalam bidang perikanan dilakukan pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung pengolahan hasil perikanan, sesuai dengan perkembangan preferensi konsumsi masyarakat terutama generasi muda mengharapkan jenis olahan ikan yang berbentuk frozen food dan pada saat ini teknologi untuk pembuatan olahan tersebut sudah tersedia dan berkembang. Selain itu adanya teknologi informasi juga dapat mengefisienkan rantai distribusi dengan memasarkan langsung, mendapat informasi faktor-faktor produksi dan sarana prasarana perikanan dan peternakan.

4. Adanya potensi pengembangan pasar dan permintaan yang tinggi ke daerah lain baik produk perikanan ataupun peternakan (benih lele, ikan hias dan daging, telur, susu). Sebagai contoh pada sektor perikanan terdapat potensi pengembangan pasar dan permintaan yang tinggi ke daerah lain untuk benih ikan lele yaitu ke Bogor dan Bandung dengan kapasitas 150 ribu ekor/bulan dan ikan hias terdapat permintaan melalui pasar on line dengan jenis ikan Koi, Koki, Guppy, Platy, Platred, Panda, Red Dragon, Hb white dan Prontosia kapasitas 500 ekor/bulan.
5. Adanya metode budidaya ikan yang dapat mengoptimalkan lahan dan meningkatkan produksi perikanan;
Adanya metode budidaya ikan yang dapat mengoptimalkan lahan dan meningkatkan produksi perikanan yaitu dengan menggunakan teknologi bioflok dan budidaya lele di kolam terpal dan pengembangan ikan di sawah (mina padi). Berdasarkan analisa usaha dari teknologi tersebut produktivitas teknologi adalah sebagai berikut:
 - Bioflok adalah sistem pemeliharaan ikan dengan penguraian mikroorganisme yang terdiri dari beberapa bakteri, mikroalga dan protozoa yang digunakan sebagai pakan alami dengan padat tebar tinggi yaitu sampai 3000 ekor/m³ dalam bak terpal berbentuk bulat dibanding dengan kolam terpal biasa. Keuntungannya sedikit

pergantian air, efisiensi pakan dan produktivitas tinggi. SR (*Survival Rate*) atau kelangsungan hidup di atas 90 persen.

- Pembesaran lele dalam terpal adalah suatu teknis budidaya dilakukan di lahan sempit atau terbatas dengan memanfaatkan pekarangan rumah atau dak rumah sebagai tempat budidaya ikan lele mulai dari ukuran 4 s/d 50m² dengan padat tebar 100-150 ekor/m². SR (*Survival Rate*) atau kelangsungan hidup sampai dengan 90 persen. Selain itu terdapat budidaya ikan dalam ember bersama dengan budidaya sayuran.
- Mina padi adalah usaha pemeliharaan ikan di sawah tujuannya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, manfaatnya adalah :
 - ✓ Meningkatkan pendapatan petani
 - ✓ Meningkatkan produksi tanaman padi
 - ✓ Meningkatkan kesuburan tanah
 - ✓ Menekan pertumbuhan gulma
 - ✓ Menekan populasi hama dan penyakit tanaman padi
 - ✓ Memenuhi kebutuhan protein hewani

Selain itu adanya metode pemeliharaan ikan di sawah dikenal dengan budidaya ikan sebagai penyelang, palawija dan tumpangsari dengan padat tebar 10.000 sampai dengan 20.000 ekor per Ha.

6. Adanya peluang membuat perikanan tangkap di waduk Jatigede dan Waduk lainnya yang sudah, sedang dan akan dibangun di Kabupaten Sumedang (Waduk Rengrang, Cipanas dan Sadawarna);

Dengan adanya peluang perikanan tangkap di wilayah Jatigede dan yang lainnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan di Kabupaten Sumedang, kegiatan perikanan di areal Waduk Jatigede dan Waduk lainnya yang sesuai dengan anjuran adalah perikanan tangkap dengan sistem *CBF (Culture Base Fisheries)* atau penangkapan berbasis budidaya dan harus ditunjang dengan kegiatan perikanan di wilayah sekitarnya dengan pengembangan benih ikan,

penyediaan pakan, budidaya, pengolahan dan pemasaran sehingga di wilayah Jatigede dapat berkembang agribisnis bidang perikanan yang dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat sekitar Waduk Jatigede dan waduk lainnya di Kabupaten Sumedang.

2.4.2 Tantangan

1. Adanya alih fungsi lahan;

Pembangunan suatu daerah memiliki berbagai dampak terhadap lingkungan suatu daerah baik dampak positif ataupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya alih fungsi lahan, hal ini sangat dirasakan oleh dunia perikanan dan peternakan. Karena dengan adanya pembangunan tersebut berakibat berkurangnya potensi perikanan maupun peternakan seperti: kolam ikan ataupun lahan pangan bahkan kandang ternak itu sendiri. Berbagai proyek pembangunan sebagai penyebab alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Sumedang, diantaranya saja adalah:

- Terbangunnya waduk Jatigede menyebabkan turunnya populasi ternak sapi potong dimana pada tahun 2017 sebanyak 29.592 ekor dan pada tahun 2018 sampai dengan bulan Juni sebanyak 24.175 ekor, sehingga terdapat penurunan sebanyak 5.417 ekor. Namun demikian pada tahun 2019 populasi sapi potong mengalami kenaikan kembali menjadi 30.458 ekor dan pada tahun 2020 naik kembali menjadi 34.915. Hal ini dimungkinkan karena adanya dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Sumedang serta APBN (Program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan) untuk pelaksanaan Inseminasi Buatan), serta peran serta masyarakat untuk beternak sapi potong. Selain itu dengan adanya pembangunan Waduk Jatigede potensi lahan untuk penanaman Hijauan Makanan Ternak seluas 4.500 ha juga hilang karena terendam. Demikian juga lahan yang digunakan untuk pembuatan Waduk Rengrang, Waduk Cipanas dan Waduk Sadawarna.

Sementara pada sektor perikanan, pembangunan Waduk Jatigede mengakibatkan hilangnya potensi perikanan kolam sekitar 25 Ha dan Mina Padi 750 Ha.

- Pembuatan jalan tol Cisumdawu sepanjang 68 km menyebabkan turunnya populasi ternak sapi perah dimana pada tahun 2017 sebanyak 4.163 ekor dan pada tahun 2018 sebanyak 4.149 ekor, sehingga ada sedikit penurunan populasi sebanyak 14 ekor. Selanjutnya pada tahun 2019 populasi sapi perah mengalami penurunan kembali menjadi 4.028 dan pada tahun 2020 menjadi 3.703 ekor.
- Pembangunan kawasan perindustrian, terutama di Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung, Rancakalong, Pamulihan dan Ujungjaya;
- Untuk perumahan, seperti di Kecamatan Jatinangor, Cimanggung dan Tanjungsari;

2. Adanya perubahan iklim

Perubahan iklim yang cukup ekstrim mengakibatkan menurunnya produktivitas perikanan dan peternakan. Misalnya saja: musim kemarau yang panjang mengakibatkan kesulitan memperoleh hijauan pakan ternak yang merupakan pakan pokok ternak, perubahan cuaca yang ekstrim mengakibatkan produksi telur dan daging ayam turun karena tingkat kematian cukup tinggi, rentannya penyakit ternak dan ikan karena daya tahan tubuh ternak dan ikan berkurang selain pada proses distribusi ternak dan ikan akan mempermudah penyebaran penyakit. Sementara untuk sektor perikanan, produktivitas ikan sangat ditentukan dengan kondisi air baik ketersediaan maupun kualitas air. Pada musim kemarau banyak kolam yang kekeringan dan pada saat hujan suhu air berubah serta pada awal penghujan biasanya banyak terjadi kematian hal ini disebabkan kualitas air sangat asam dan limpasan oksigen yang tinggi secara mendadak.

3. Adanya pasokan produk perikanan dan peternakan dari luar daerah yang dapat menjadi pesaing produk lokal;

Di era globalisasi atau era pasar bebas seperti sekarang ini sangat mungkin berbagai produk dari luar sumedang lebih mudah masuk ke pasaran Sumedang dan bersaing dengan produk lokal sehingga produk perikanan dan peternakan lokal harus memiliki daya saing tinggi terhadap produk yang datang dari luar tersebut dengan cara peningkatan kuantitas maupun kualitas produk lokal tersebut baik secara intensifikasi ataupun ekstensifikasi.

4. Jumlah populasi sapi perah menurun menyebabkan produksi susu menurun;

Berbagai hal yang menyebabkan penurunan populasi sapi perah tersebut, diantaranya saja adalah adanya alih fungsi lahan kawasan Tol Cisumdawu wilayah barat (Pamulihan, Tanjungsari, Sukasari, Jatinangor, Rancakalong) yang merupakan kawasan potensi sapi perah, biaya produksi sapi perah lebih besar dari harga susu, motivasi untuk menjadi peternak semakin berkurang terutama di kalangan generasi muda, dan lain-lain. Hal ini senada dengan hal yang terjadi di lapangan, dimana populasi sapi perah tahun 2017 sebanyak 4.163 ekor dan pada tahun 2018 sebanyak 4.149 ekor, sehingga ada penurunan sebanyak 14 ekor. Produksi susu tahun 2017 sebanyak 12.379 ton, dan produksi susu tahun 2018 sebanyak 12.323 ton, sehingga ada penurunan sebanyak 56 ton. Selanjutnya pada tahun 2019 populasi sapi perah mengalami penurunan kembali menjadi 4.028 dan pada tahun 2020 menjadi 3.703 ekor. Hal ini mengakibatkan produksi susu juga mengalami penurunan, pada tahun 2019 sebanyak 11.978 ton dan pada tahun 2020 sebanyak 8.619 ton. Hal ini karena adanya penurunan populasi sapi perah dan belum optimalnya produktifitas per ekor sapi perah yang ada.

5. Akses permodalan;

Para peternak, pembudidaya ikan, dan pengolah / pemasar produk perikanan dan peternakan, sangat kurang terhadap akses permodalan. Berbagai hal hal yang menyebabkan kurangnya akses permodalan, diantaranya usaha yang dilakukan masih kecil serta ditambah dengan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, sehingga mereka tidak ada akses kepada sumber-sumber permodalan yang resmi.

6. Dilihat dari sisi Sumber Daya Manusia, jumlah dan kualitas pegawai yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan adalah belum memadai bila dibandingkan dengan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat.

7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi budidaya perikanan dan peternakan.

Hal ini berpengaruh terhadap kualitas produksi yang dihasilkan, sehingga belum bisa bersaing dengan daerah-daerah lainnya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Dinas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Perikanan dan Peternakan ke depan. Selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang periode 2021-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan 2019-2020 dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang masih perlu ditingkatkan dalam upaya mencapai standar pelayanan dalam urusan Perikanan dan Peternakan. Adapun permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan yang menjadi dasar pembuatan solusi kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan
berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Bidang Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya hasil produksi perikanan; 2. Masih belum optimalnya nilai tambah dari hasil perikanan; 3. Belum optimalnya pemanfaatan kolam air tenang dan mina padi dalam meningkatkan produktivitas;
2	Bidang Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya produksi daging, telur dan susu; 2. Belum memadainya pakan dan hijauan makanan ternak; 3. Belum optimalnya pelayanan inseminasi buatan; 4. Sarana dan prasarana peternakan belum memadai; 5. Belum optimalnya pemanfaatan limbah organik (bio energi); 6. Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan inti plasma bidang peternakan; 7. Belum tersedianya pasar hewan terpadu dan rumah potong hewan; 8. Belum optimalnya pengolahan produksi hasil peternakan;
3	Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya serangan hama / penyakit ikan dan hewan; 2. Menurunnya kualitas air di lokasi produksi budidaya ikan; 3. Belum adanya penjaminan mutu produk asal hewan; Belum tersedianya regulasi kesehatan ikan dan hewan serta konservasi

Sumber : Hasil FGD

Selain hal-hal tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan intern yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, seperti jumlah pegawai yang belum memadai, kapasitas dan kompetensi pegawai, dan mekanisme dan pola kerja terpadu dan terarah yang belum tercipta.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Sesuai dengan arahan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode 2018-2023 sebagai berikut:

***“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera,
Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI)
pada Tahun 2023”***

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Menkuatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;

3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Adapun dalam misi tersebut, Dinas Perikanan dan Peternakan mengemban misi nomor 1 (satu) yakni Misi **3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur serta penguatan budaya dan kearifan lokal.** Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Dinas Perikanan dan Peternakan	Hambatan Dinas Perikanan dan Peternakan Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Perikanan dan Peternakan dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur serta penguatan budaya dan kearifan lokal.	Masih belum optimalnya produksi peternakan dan perikanan yang mencakup rendahnya sarana dan prasarana, produktivitas, nilai tambah dan hasil produksi perikanan dan peternakan; tingginya serangan hama/penyakit ikan dan hewan;rendahnya kualitas air di lokasi produksi budidaya ikan; sistem penjaminan mutu produk asal hewan dan regulasi kesehatan ikan dan hewan serta konservasi yang belum tersedia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki sistem produksi dan pengolahan hasil perikanan dan peternakan dari hulu sampai hilir dalam rangka peningkatan produktivitas dan nilai tambah 2. Memperkuat sistem dan implementasi manajemen pengelolaan perikanan dan peternakan

Sumber : Hasil FGD

3.3 Telaahan Renstra Kementerian, Provinsi

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Rentsra Dinas Kabupaten	Sasaran pada	Sasaran
			Renstra Provinsi	pada Renstra Kementerian
1	2	3	4	5
1	Jumlah populasi ternak (sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik) dan Jumlah produksi peternakan (daging, telur, susu)	Meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan peternakan	Meningkatnya produksi peternakan (Ranwal Renstra 2019-2023)	Meningkatkan produksi Pangan Hewani asal ternak
2	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina			Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Peternakan
3	Persentase pengendalian penyakit hewan			(Renstra 2015-2019)
4	Persentase jaminan keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)			
5	Jumlah produksi perikanan (Ikan Konsumsi, Ikan Hias dan Benih Ikan)	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan dan kelautan Jawa Barat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (Renstra 2015-2019)	
6	Jumlah unit pengolahan dan pemasaran perikanan			Jawa Barat sebagai sentra benih
7	Persentase kelestarian lingkungan budidaya perikanan			

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Provinsi Jawa Barat

3.4.1 Renstra Lingkungan Hidup Jawa Barat

RTRW merupakan matra spasial dari RPJP, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis provinsi dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5

(lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan). Keselarasan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan, koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk aspek daya dukung lingkungannya. Koordinasi khususnya dalam mensosialisasikan dan memberi pemahaman tentang penerapan 4 (empat) sasaran penataan ruang terkait ruang kawasan lindung dan ruang ketahanan pangan, ruang investasi dan dukungan infrastruktur strategis, ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta pelaksanaan prinsip mitigasi bencana, dalam mencapai tujuan penataan ruang Jawa Barat yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Kajian lingkungan hidup strategis RTRW Provinsi Jawa Barat diinternalisasikan dalam kebijakan kawasan lindung 45% dari luas Jawa Barat. Selain itu, beberapa program provinsi dan rencana aksi daerah yang harus ditindaklanjuti dalam memenuhi komitmen Provinsi untuk mendukung komitmen Pemerintah dalam memperoleh pengakuan global. Tantangan penataan ruang akibat peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menuntut penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai, serta infrastruktur strategis antar pusat kegiatan untuk mendukung kemudahan aktivitas ekonomi dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan. Perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKN-provinsi (PKNp), dan Pusat

Kegiatan Wilayah (PKW) perlu diwujudkan sesuai sarana prasarana minimal yang harus tersedia. Cakupan pelayanan pusat kegiatan yang berupa kawasan perkotaan, akan terus berkembang, termasuk fenomena metropolitan dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru yang didorong perkembangannya. Pembangunan di kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan perlu dikelola agar sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Dinamika perubahan kebijakan internal dan eksternal, termasuk perkembangan kawasan perkotaan, menjadi perhatian dalam peninjauan kembali RTRWP pada periode 5 (lima) tahun ke depan.

3.4.2 Telahaan RTRW Kabupaten Sumedang

3.4.1 Pola Ruang Kawasan Lindung

A. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 9.085 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Jatinangor;
- b. Kecamatan Cimanggung;
- c. Kecamatan Tanjungsari;
- d. Kecamatan Sukasari;
- e. Kecamatan Pamulihan;
- f. Kecamatan Rancakalong;
- g. Kecamatan Sumedang Selatan;
- h. Kecamatan Ganeas;
- i. Kecamatan Situraja;
- j. Kecamatan Cisituh;
- k. Kecamatan Darmaraja;
- l. Kecamatan Cibugel;
- m. Kecamatan Jatinunggal;
- n. Kecamatan Jatigede;
- o. Kecamatan Tomo;
- p. Kecamatan Conggeang;
- q. Kecamatan Paseh;
- r. Kecamatan Cimalaka;
- s. Kecamatan Tanjungkerta;
- t. Kecamatan Tanjungmedar; dan
- u. Kecamatan Buahdua.

B. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan resapan air di wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih 20.017 Ha tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

C. Kawasan Perlindungan Setempat

C.1 Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 2.318 Ha meliputi: a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Rancakalong; d. Kecamatan Sukasari; e. Kecamatan Pamulihan; f. Kecamatan Sumedang Utara; g. Kecamatan Sumedang Selatan; h. Kecamatan Ganeas; i. Kecamatan Cisarua; j. Kecamatan Cimalaka; k. Kecamatan Paseh; l. Kecamatan Tanjungkerta; m. Kecamatan Tanjungmedar; n. Kecamatan Darmaraja; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisitu; q. Kecamatan Cibugel; r. Kecamatan Wado; s. Kecamatan Jatinunggal; t. Kecamatan Jatigede; u. Kecamatan Tomo; v. Kecamatan Ujungjaya; w. Kecamatan Conggeang; x. Kecamatan Buahdua; dan y. Kecamatan Surian.

C.2 Kawasan Sempadan Waduk

Kawasan sekitar waduk sebagaimana dengan ketentuan bentuk daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk, sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat seluas 1.255 Ha, meliputi : a. Kecamatan Situraja; b. Kecamatan Cisitu; c. Kecamatan Darmaraja; d. Kecamatan Cibugel; e. Kecamatan Wado; f. Kecamatan Jatinunggal; g. Kecamatan Jatigede; h. Kecamatan Ujungjaya; i. Kecamatan Conggeang; j. Kecamatan Paseh; k. Kecamatan Buahdua; dan l. Kecamatan Surian.

C.3 Kawasan Danau

Kawasan danau dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar meliputi: a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Tomo; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungkerta; e. Kecamatan Tanjungmedar; dan f. Kecamatan Sumedang Selatan.

C.4 Kawasan Waduk

Kawasan waduk dengan luas kurang lebih 3.293 hektar meliputi: a. Kecamatan Cisit; b. Kecamatan Darmaraja; c. Kecamatan Cibugel; d. Kecamatan Wado; e. Kecamatan Jatinunggal; f. Kecamatan Jatigede; g. Kecamatan Ujungjaya; h. Kecamatan Buahdua; i. Kecamatan Conggeang; dan j. Kecamatan Surian. Kawasan Waduk dapat dimanfaatkan dalam rangka budidaya perikanan untuk penangkapan ikan dan kawasan konservasi serta pelestarian jenis-jenis ikan lokal untuk mendukung pencapaian produksi perikanan.

C.5 Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan sekitar mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter meliputi: a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungsari; e. Kecamatan Sukasari; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Utara; h. Kecamatan Sumedang Selatan; i. Kecamatan Ganeas; j. Kecamatan Cisarua; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Paseh; m. Kecamatan Tanjungkerta; n. Kecamatan Tanjungmedar; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisit; q. Kecamatan Darmaraja; r. Kecamatan Cibugel; s. Kecamatan Wado; t. Kecamatan Jatinunggal; u. Kecamatan Jatigede; v. Kecamatan Tomo; w. Kecamatan Ujungjaya; x. Kecamatan Conggeang; y. Kecamatan Buahdua; dan z. Kecamatan Surian.

D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

D.1 Kawasan Cagar Alam

Kawasan cagar alam berupa Cagar Alam Gunung Jagat dengan luas kurang lebih 134 Ha meliputi: a. Kecamatan Jatinunggal; dan b. Kecamatan Jatigede.

D.2 Kawasan Taman Hutan Raya

Kawasan taman hutan raya berupa Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Palasari dengan luas 35 Ha terletak di Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan meliputi: a. Gunung Palasari seluas 31,2189 hektar; dan b. Gunung Kunci dengan luas 3, 6686 hektar.

D.3 Kawasan Taman Wisata Alam

Kawasan taman wisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas dengan luas kurang lebih 1.075 Ha meliputi: a. Kecamatan Cimalaka; b. Kecamatan Conggeang; dan c. Kecamatan Buahdua.

D.4 Kawasan Lindung Geologi

D.4.1 Kawasan Cekungan Air Tanah meliputi :

- a. cekungan air tanah yang merupakan zona kritis di Kecamatan Cimanggung;
- b. cekungan air tanah yang merupakan zona rawan di Kecamatan Cimanggung; dan c. cekungan air tanah yang merupakan zona aman meliputi: 1. Kecamatan Cimanggung; 2. Kecamatan Pamulihan; 3. Kecamatan Tanjungsari; 4. Kecamatan Sukasari; 5. Kecamatan Rancakalong; 6. Kecamatan Sumedang Utara; 7. Kecamatan Sumedang Selatan; 8. Kecamatan Ganeas; 9. Kecamatan Cisarua; 10. Kecamatan Cimalaka; 12. Kecamatan Paseh; 13. Kecamatan Tanjungkerta; 14. Kecamatan Situraja; 15. Kecamatan Cisitu; 16. Kecamatan Darmaraja; 17. Kecamatan

Cibugel; 18. Kecamatan Wado; 19. Kecamatan Jatinunggal; 20. Kecamatan Tomo; 21. Kecamatan Ujungjaya; 22. Kecamatan Conggeang; 23. Kecamatan Buahdua; dan 24. Kecamatan Jatinangor.

D.4.2 Kawasan Sempadan Mata Air dengan luas 1.194 Ha meliputi :

- a. Kecamatan Rancakalong;
- b. Kecamatan Sumedang Utara;
- c. Kecamatan Jatigede;
- d. Kecamatan Tomo;
- e. Kecamatan Conggeang;
- f. Kecamatan Paseh;
- g. Kecamatan Cimalaka;
- h. Kecamatan Tanjungkerta;
- i. Kecamatan Tanjungmedar; dan
- j. Kecamatan Buahdua.

D.5 Kawasan Lindung Lainnya

D.5.1 Kawasan Taman Buru berupa Kawasan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi dengan luas kurang lebih 8.672 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Cimanggung dengan luas kurang lebih 1.263 hektar;
- b. Kecamatan Pamulihan dengan luas kurang lebih 876 hektar;
- c. Kecamatan Sumedang Selatan dengan luas kurang lebih 3.364 hektar;
- d. Kecamatan Ganeas dengan luas kurang lebih 76 hektar;
- e. Kecamatan Situraja dengan luas kurang lebih 832 hektar;
- f. Kecamatan Cisitu dengan luas kurang lebih 881 hektar;
- g. Kecamatan Darmaraja dengan luas kurang lebih 392 hektar; dan
- h. Kecamatan Cibugel dengan luas kurang lebih 988 hektar.

D.5.2 Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi Situs dan Wisata Sejarah.

D.5.3 Kawasan RTH perkotaan dengan luas kurang lebih 2.774 hektar ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan meliputi:

- a. RTH publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20%; dan

- b. RTH privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10 %.

3.4.2 Pola Ruang Kawasan Budidaya

A. Kawasan Hutan Produksi

A.1 Hutan Produksi Terbatas

A.1.1 Kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dengan intensitas rendah memiliki luas kurang lebih 7.121 Ha, meliputi : a. Kecamatan Sumedang Selatan; b. Kecamatan Ganeas; c. Kecamatan Situraja; d. Kecamatan Cisitu; e. Kecamatan Darmaraja; f. Kecamatan Cibugel; g. Kecamatan Wado; h. Kecamatan Jatigede; i. Kecamatan Tomo; j. Kecamatan Conggeang; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Tanjungkerta; m. Kecamatan Tanjungmedar; n. Kecamatan Buahdua; dan o. Kecamatan Surian.

A.2 Hutan Produksi Tetap

A.2.1 Kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan memiliki luas kurang lebih 13.606 Ha, meliputi : a. Kecamatan Pamulihan; b. Kecamatan Sumedang Selatan; c. Kecamatan Wado; d. Kecamatan Jatigede; e. Kecamatan Tomo; f. Kecamatan Ujungjaya; g. Kecamatan Conggeang; h. Kecamatan Paseh; i. Kecamatan Cimalaka; j. Kecamatan Tanjungmedar; k. Kecamatan Buahdua; dan l. Kecamatan Surian. *A.2.2 Kawasan hutan produksi yang direncanakan untuk kegiatan lainnya memiliki luas 4.382 Ha.*

A.2.3 Kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dengan intensitas rendah memiliki luas kurang lebih 7.121 Ha, meliputi : a. Kecamatan Sumedang Selatan; b. Kecamatan Ganeas; c. Kecamatan Situraja; d. Kecamatan Cisitu; e. Kecamatan Darmaraja; f. Kecamatan

Cibugel; g. Kecamatan Wado; h. Kecamatan Jatigede; i. Kecamatan Tomo; j. Kecamatan Conggeang; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Tanjungkerta; m. Kecamatan Tanjungmedar; n. Kecamatan Buahdua; dan o. Kecamatan Surian.

A.2.4 Kawasan hutan produksi yang direncanakan untuk kegiatan lainnya memiliki luas kurang lebih 1.180 Ha.

B. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 4.734 Ha, meliputi: a. Kecamatan Rancakalong; b. Kecamatan Sumedang Utara; c. Kecamatan Sumedang Selatan; d. Kecamatan Ganeas; e. Kecamatan Cisarua; f. Kecamatan Cimalaka; g. Kecamatan Paseh; h. Kecamatan Tanjungkerta; i. Kecamatan Tanjungmedar; j. Kecamatan Situraja; k. Kecamatan Cisitu; l. Kecamatan Darmaraja; m. Kecamatan Cibugel; n. Kecamatan Wado; o. Kecamatan Jatinunggal; p. Kecamatan Jatigede; q. Kecamatan Tomo; r. Kecamatan Ujungjaya; s. Kecamatan Conggeang; t. Kecamatan Buahdua; dan u. Kecamatan Surian.

C. Kawasan Pertanian

C.1 Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 30.069 Ha tersebar di seluruh wilayah kabupaten meliputi: a. lahan beririgasi; dan b. lahan tidak beririgasi.

C.2 Kawasan Peruntukan Hortikultura

Kawasan peruntukan hortikultura tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

C.3 Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan berupa perkebunan rakyat tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

C.4 Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan meliputi:

- a. Kawasan peruntukan ternak besar meliputi kawasan sapi potong nasional, kawasan sapi potong di luar kawasan nasional dan kawasan ternak besar lainnya;
- b. Kawasan peruntukan ternak kecil tersebar seluruh wilayah kabupaten; dan
- c. Kawasan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan Pakan Tambahan (konsentrat) tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

C.5 Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) memiliki luas kurang lebih 30.069 Ha.

D. Kawasan Perikanan

D.1 Kawasan Perikanan Budidaya Kolam

Kawasan perikanan budidaya di kolam, sawah, sungai, situ dan embung tersebar di seluruh wilayah kabupaten untuk mendukung pencapaian produksi perikanan.

D.2 Kawasan Perikanan Budidaya Waduk

Kawasan perikanan budidaya di Waduk Jatigede dan Kawasan Cincin Tampomas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sebagai kawasan minapolitan. Sebagai kawasan budidaya sesuai ketentuan yang berlaku, untuk mendukung pencapaian produksi perikanan dan pelestarian / konservasi ikan lokal.

E. Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikembangkan berdasarkan wilayah pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Adapun kawasan wilayah usaha pertambangan meliputi : a. Kecamatan Tanjungsari; b. Kecamatan Pamulihan; c. Kecamatan Rancakalong; d. Kecamatan Sumedang Utara; e. Kecamatan Situraja; f. Kecamatan Cisitu; g. Kecamatan Darmaraja; h. Kecamatan Jatinunggal; i. Kecamatan Jatigede; j. Kecamatan Tomo; k. Kecamatan Ujungjaya; l. Kecamatan Conggeang; m. Kecamatan Paseh; n. Kecamatan Cimalaka; o. Kecamatan Cisarua; p. Kecamatan Tanjungkerta; q. Kecamatan Tanjungmedar; r. Kecamatan Buahdua; dan s. Kecamatan Surian.

F. Kawasan Pariwisata

F.1 Pariwisata Budaya

Pengembangan pariwisata budaya meliputi:

- a. Saung Budaya Sumedang di Kecamatan Jatinangor;
- b. Makam Pasarean Gede di Kecamatan Sumedang Selatan;
- c. Makam Dayeuhluhur di Kecamatan Ganeas;
- d. Makam Marongge di Kecamatan Tomo;
- e. Desa Wisata Rancakalong di Kecamatan Rancakalong;
- f. Kampung Sunda di Kawasan Jatigede di Kecamatan Jatigede;
- g. Relokasi situs-situs yang terendam Waduk Jatigede diarahkan ke daerah:
 1. Kampung Munjul di Kecamatan Darmaraja;
 2. Situs Tajimalela di Kecamatan Cisitu; dan
 3. Daerah lainnya berdasarkan hasil kajian atau studi.
- h. Wisata *Geotheater* di Kecamatan Rancakalong; dan
- i. Wisata budaya lainnya.

F.2 Pariwisata Alam

Pengembangan pariwisata alam meliputi: a. Bumi Perkemahan Kiarapayung di Kecamatan Jatinangor; b. Bumi Perkemahan Cijambu di Kecamatan Tanjungsari; c. Pemandian Cipanteuneun di Kecamatan Cimalaka; d. Baru beureum di Kecamatan Sukasari; e. Wana wisata Cibingbin di Kecamatan Sumedang Selatan; f. Curug Sindulang Kecamatan Cimanggung; g. Curug Cigorobog di Kecamatan Sumedang Selatan; h. Curug Cipongkor di Kecamatan Sumedang Selatan; i. TWA Gunung Kunci di Kecamatan Sumedang Selatan; j. TWA Gunung Palasari di Kecamatan Sumedang Selatan; k. Situ Sari di Kecamatan Tomo; l. Cipanas Sekarwangi di Kecamatan Buahdua; m. Cipanas Cileungsing di Kecamatan Buahdua; n. Pangjugjungan di Kecamatan Pamulihan; o. Panenjoan di Kecamatan Rancakalong; p. Bumi Kahiyangan di Kecamatan Sukasari; q. Situ Cipaingeun di Kecamatan Paseh; dan r. Wisata Alam lainnya.

F.3 Pariwisata Buatan

Pengembangan pariwisata buatan meliputi: a. pengembangan Kawasan Wisata Jatigede di Kecamatan Jatigede; b. pengembangan objek wisata Klub Golf dan Resort Jatigede di Kecamatan Jatigede; c. Museum Geusan Ulun di Kecamatan Sumedang Selatan; d. Museum Jatigede di Kecamatan Jatigede; e. Rencana Kampung Sunda di Kecamatan Jatigede; f. Wisata Pendidikan dan Olahraga Modern di Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Jatinangor; dan g. Wisata buatan lainnya.

F.4 Pariwisata Minat Khusus

Pengembangan pariwisata minat khusus meliputi: a. pengembangan objek wisata Kampung Toga di Kecamatan Sumedang Selatan; b. pengembangan objek wisata Batu dua di Kecamatan Cisitu; c. pengembangan objek wisata Klub Golf di

Kecamatan Jatinangor; dan d. pengembangan objek wisata minat khusus lainnya.

F.5 Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terletak di Kawasan Pariwisata Jatigede.

G. Kawasan Industri

G.1 Kawasan Industri Besar

Kawasan peruntukan industri besar memiliki luas kurang lebih 3.007 Ha meliputi:

- a. Optimalisasi Kawasan Industri Cimanggung/Rancaekek dengan luas kurang lebih 343 Ha meliputi:
 1. Kecamatan Jatinangor; dan
 2. Kecamatan Cimanggung.
- b. Pengembangan Kawasan Industri Ujungjaya dengan luas kurang lebih 1.517 Ha meliputi:
 1. Kecamatan Ujungjaya; dan
 2. Kecamatan Tomo.
- c. Pengembangan Kawasan Industri Buahdua dengan luasan kurang lebih 1.147 Ha di Kecamatan Buahdua.

G.2 Kawasan Industri Menengah

Kawasan peruntukan industri menengah berupa industri kecil menengah terdiri atas:

- a. pengembangan industri menengah tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
- b. pengembangan sentra-sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) potensial tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan
- c. pengembangan sentra-sentra IKM di area peristirahatan dan *interchange* jalan bebas hambatan dalam rangkaantisipasi pengembangan jalan bebas hambatan Cisumdawu.

G.3 Kawasan Industri Kecil

Kawasan peruntukan industri kecil tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

H. Kawasan Permukiman

H.1 Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan memiliki luas kurang lebih 9.246 Ha meliputi: a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Tanjungsari; d. Kecamatan Sukasari; e. Kecamatan Pamulihan; f. Kecamatan Sumedang Utara; g. Kecamatan Sumedang Selatan; h. Kecamatan Cimalaka; i. Kecamatan Paseh; j. Kecamatan Tomo; k. Kecamatan Ujungjaya; l. Kecamatan Conggeang; m. Kecamatan Cisarua; dan n. Kecamatan Tanjungkerta.

H.2 Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas kurang lebih 7.772 Ha tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

I. Kawasan Peruntukan Lainnya

I.1 Pusat Pemerintahan Kabupaten

Kawasan pusat pemerintahan kabupaten memiliki luas kurang lebih 32 Ha terletak di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara.

I.2 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi: a. kawasan militer TNI Angkatan Darat (Yonif 301 Prabu Kiansantang) di Kecamatan Cimalaka; b. komando distrik militer (KODIM) 0610 di Kecamatan Sumedang Selatan; c. sub detasemen polisi militer (SUBDENPOM) di Kecamatan Sumedang Selatan; d. kawasan Kepolisian Resor (POLRES) Sumedang di Kecamatan Sumedang Utara; dan

e. Koramil, dan Polsek yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.

I.3. Sarana prasarana Instalasi PLTA Parakan Kondang dan Instalasi lainnya

Sarana prasarana instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air Parakan Kondang dan instalasi lainnya memiliki luas kurang lebih 278 Ha terletak di Kecamatan Jatigede. Instalasi lainnya memiliki luas kurang lebih 5 (lima) hektar tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

I.4 Kawasan Pendidikan Tinggi

Kawasan pendidikan tinggi memiliki luas kurang lebih 370 Ha di Kecamatan Jatinangor.

3.5 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Perikanan dan Peternakan, telaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD, Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya dan telaahan KLHS terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis, yakni :

- 1) Permasalahan dalam produktivitas perikanan;
- 2) Permasalahan dalam produktivitas peternakan;
- 3) Permasalahan dalam pengelolaan kesehatan ikan dan hewan;
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi;
- 5) Permasalahan perlindungan ekosistem; dan
- 6) Permasalahan Sumberdaya Manusia.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.4 Isu Strategis dalam bidang Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Sintesis Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	Permasalahan dalam produktivitas perikanan	Masalah produktivitas perikanan tercermin dalam rendahnya hasil produksi perikanan, nilai tambah hasil perikanan yang belum maksimal, dan pemanfaatan kolam air tenang dan mina padi yang masih minim.	Belum optimalnya produktivitas hasil perikanan dan peternakan
2	Permasalahan dalam produktivitas peternakan	Masalah produktivitas peternakan tercermin dalam rendahnya produksi daging, telur dan susu, belum tersedianya pasar hewan terpadu dan rumah potong hewan, pelayanan inseminasi buatan dan pengolahanm produksi hasil peternakan yang belum maksimal; sarana dan prasarana peternakan yang masih terbatas, pemanfaatan limbah organik (bio energi) dan pelaksanaan kemitraan inti plasma bidang peternakan belum berjalan secara baik, dan pakan dan hijauan makanan ternak yang belum memadai.	
3	Permasalahan dalam pengelolaan kesehatan ikan dan hewan	Masalah pengelolaan kesehatan ikan dan hewan tercermin dalam tingginya serangan hama/penyakit ikan dan hewan, kualitas air di lokasi produksi budidaya ikan yang semakin menurun; belum adanya penjaminan mutu produk asal hewan; dan belum tersedianya regulasi kesehatan ikan dan hewan serta konservasi.	
4.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi	Pemanfaatan teknologi oleh para pembudidaya ikan dan para peternak yang belum optimal di sektor hulu, produksi dan pasca produksi	
5.	Permasalahan perlindungan ekosistem	Dalam kegiatan usaha perikanan dan usaha peternakan belum sepenuhnya memperhatikan perlindungan ekosistem	
6.	Permasalahan Sumberdaya Manusia	Sumber daya manusia untuk pelayanan maupun sumber daya manusia para peternak dan pembudidaya ikan masih rendah, dan cenderung mengalami penurunan jumlah, terutama untuk kalangan anak muda	

Belum optimalnya produktivitas perikanan dan peternakan merupakan isu strategis dan permasalahan umum yang pokok dalam usaha penumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor perikanan dan peternakan. Hal ini diindikasikan oleh beberapa masalah yang dihadapi di lapangan baik dalam bidang peternakan, perikanan ataupun pengelolaan kesehatan ikan dan hewan, yakni: masih rendahnya hasil produksi perikanan, nilai tambah hasil perikanan yang belum maksimal, pemanfaatan kolam air tenang dan mina padi yang masih minim, rendahnya produksi daging, telur dan susu, belum tersedianya pasar hewan terpadu dan rumah potong hewan, pelayanan inseminasi buatan dan pengolahan produksi hasil peternakan yang belum maksimal; sarana dan prasarana peternakan yang masih terbatas, pemanfaatan limbah organik (bioenergi) dan pelaksanaan kemitraan inti plasma bidang peternakan belum berjalan secara baik, hijauan makanan ternak yang belum memadai, pengelolaan kesehatan ikan dan hewan masih rendah yang tercermin dalam tingginya serangan hama/penyakit ikan dan hewan, kualitas air di lokasi produksi budidaya ikan yang semakin menurun; belum adanya penjaminan mutu produk asal hewan dan belum tersedianya regulasi kesehatan ikan dan hewan serta konservasi. Selain itu permasalahan belum optimalnya pemanfaatan teknologi, perlindungan ekosistem, dan sumber daya manusia perikanan dan peternakan.

Berbagai solusi untuk memecahkan masalah tersebut, diantaranya melalui penataan dan pemenuhan sarana prasarana pengelolaan bidang perikanan dan peternakan, perbaikan sistem produksi hasil perikanan dan peternakan dari hulu sampai hilir dan penguatan sistem dan implementasi manajemen pengelolaan

perikanan dan peternakan, serta pemanfaatan teknologi, perlindungan terhadap ekosistem untuk budidaya perikanan dan peternakan, serta peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan dan para peternak serta pembudi daya perikanan.

BAB IV

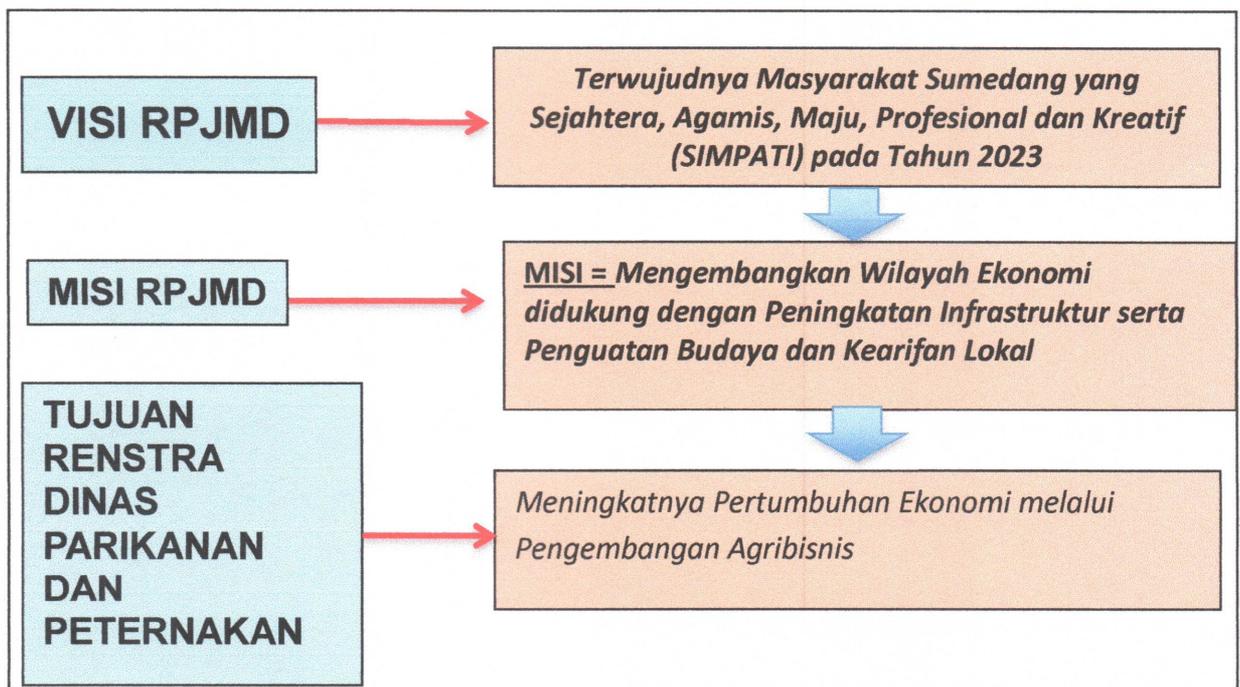
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang perlu menetapkan perubahan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Tujuan dari Dinas Perikanan dan Peternakan adalah :

“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis”

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Perikanan dan Peternakan dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Untuk dapat mengoperasionalkan tujuan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, maka disusun sasaran dari tujuan tersebut, beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan untuk periode 2021 – 2023. Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Perikanan dan Peternakan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	PENJELASAN RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			SUMBER DATA
									2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Tercatat	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Darat yang tercatat	Ton	1.190	1.290,82	1.400,54	1.519,58	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SUMEDANG
				Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang Tercatat	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (Ikan Konsumsi) yang tercatat	Ton	8.080	8.241,16	8.405,99	8.574,11	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SUMEDANG
			Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	$((\text{Populasi Ternak \& Produksi Peternakan Tahun } n - \text{Populasi Ternak \& Produksi Peternakan Tahun } n-1) / \text{Populasi Ternak \& Produksi Peternakan Tahun } n-1) \times 100 \%$	Rata-rata persentase dari kenaikan populasi dan produksi peternakan	%	67,10	5,18	5,18	5,18	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SUMEDANG
			Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase wilayah yang terkontrol dari penyakit hewan menular strategis	$(\text{Jumlah Kecamatan yang terkontrol dari PHMS} / \text{Jumlah Kecamatan Keseluruhan}) \times 100 \%$	Persentase jumlah kecamatan di Kabupaten Sumedang yang tidak terjangkit penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	-	80,80	80,80	80,80	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SUMEDANG

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang terdiri dari Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, Persentase peningkatan produktivitas peternakan, dan Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis, seperti tercantum dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	PENJELASAN RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET			SUMBER DATA
									2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang Tercatat	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Darat yang tercatat	Ton	1.190	1.290,82	1.400,54	1.519,58	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SUMEDANG
				Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang Tercatat	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (Ikan Konsumsi) yang tercatat	Ton	8.080	8.241,16	8.405,99	8.574,11	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SUMEDANG
			Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	((Populasi Ternak & Produksi Peternakan Tahun n - Populasi Ternak & Produksi Peternakan Tahun n-1) / Populasi Ternak & Produksi Peternakan Tahun n-1) X 100 %	Rata-rata persentase dari kenaikan populasi dan produksi peternakan	%	67,10	5,18	5,18	5,18	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SUMEDANG
			Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	(Jumlah Kecamatan yang terkendali dari PHMS / Jumlah Kecamatan Keseluruhan) X 100 %	Persentase jumlah kecamatan di Kabupaten Sumedang yang tidak terjangkau penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	-	80,80	80,80	80,80	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SUMEDANG

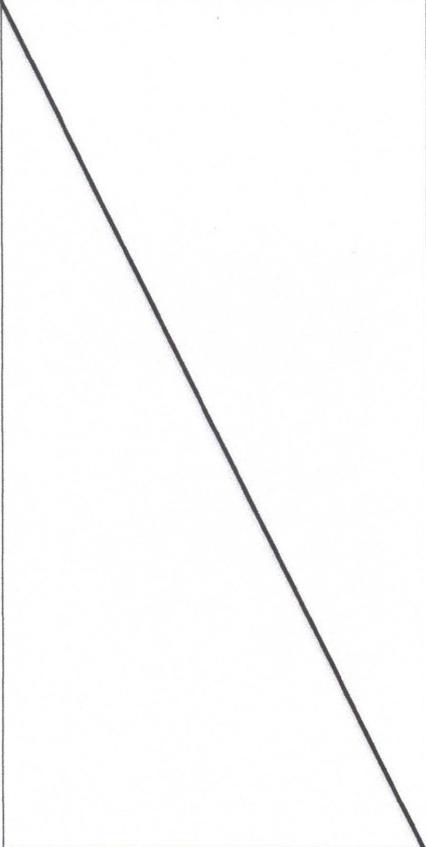
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Peternakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Perikanan dan Peternakan harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan periode 2021-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Analisa SWOT Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan (UU-PP-Perpres-Permen-Perda yang mendukung tugas dan fungsi urusan perikanan dan peternakan); Adanya koordinasi yang baik dengan instansi vertikal; Adanya potensi pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung pengolahan perikanan dan peternakan; Adanya potensi pengembangan pasar dan permintaan yang tinggi ke daerah lain untuk benih lele, ikan hias dan ayam pedaging; Adanya metode budidaya ikan yang dapat mengoptimalkan lahan dan meningkatkan produksi perikanan; Adanya peluang membuat perikanan tangkap di Perairan Umum Darat (PUD) 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya alih fungsi lahan; Adanya perubahan iklim; Adanya pasokan produk perikanan dan peternakan dari luar daerah yang dapat menjadi pesaing dengan produk lokal; Jumlah populasi sapi perah menurun menyebabkan produksi susu menurun Terjadinya Kejadian Penyakit Hewan Menular di Luar Daerah
	<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya komitmen pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi; Memiliki SOTK yang jelas; Adanya kedisiplinan pegawai; 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, budidaya peternakan, dan kesehatan hewan Penerapan metode budidaya ikan dan ternak Pengawasan penangkapan ikan di Perairan Umum Darat (PUD)
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai; Sarana dan prasarana kurang memadai; SOP belum lengkap; Kurangnya kualitas koordinasi antar unit kerja di Dinas Perikanan dan Peternakan 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan teknologi pengolahan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan peternakan. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan peternakan Perluasan cakupan pasar hasil perikanan tangkap, perikanan budidaya dan peternakan 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan, dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner

5.1.1 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Produksi Perikanan Tangkap
 - a. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan perikanan tangkap
 - b. Pengawasan penangkapan ikan di Perairan Umum Darat (PUD)
 - c. Peningkatan teknologi pengolahan perikanan tangkap.
 - d. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan perikanan tangkap.
 - e. Perluasan cakupan pasar hasil perikanan tangkap
 - f. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan tangkap
 - g. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan tangkap
2. Produksi Perikanan Budidaya
 - a. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan perikanan budidaya
 - b. Penerapan metode budidaya ikan.
 - c. Peningkatan teknologi pengolahan perikanan budidaya.
 - d. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan perikanan budidaya
 - e. Perluasan cakupan pasar hasil perikanan budidaya
 - f. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan budidaya
 - g. Pengendalian fungsi lahan perikanan budidaya
 - h. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan budidaya

3. Persentase peningkatan produktivitas peternakan
 - a. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan budidaya peternakan
 - b. Penerapan metode budidaya ternak
 - c. Peningkatan teknologi pengolahan peternakan.
 - d. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan peternakan
 - e. Perluasan cakupan pasar hasil peternakan
 - f. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk peternakan
 - g. Pengendalian fungsi lahan peternakan
 - h. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang peternakan
4. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
 - a. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan kesehatan hewan
 - b. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan peternakan
 - c. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner
 - d. Pengendalian Penyakit Hewan

5.1.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang adalah :

1. Produksi Perikanan Tangkap
 - a. Meningkatkan sarana-prasarana pengelolaan perikanan tangkap
 - b. Melaksanakan Pengawasan penangkapan ikan di Perairan Umum Darat (PUD)
 - c. Meningkatkan teknologi pengolahan perikanan tangkap.
 - d. Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan perikanan tangkap.
 - e. Memperluas cakupan pasar hasil perikanan tangkap
 - f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perikanan tangkap
 - g. Meningkatkan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan tangkap
2. Produksi Perikanan Budidaya
 - a. Meningkatkan sarana-prasarana pengelolaan perikanan budidaya
 - b. Menerapkan metode budidaya ikan.
 - c. Meningkatkan teknologi pengolahan perikanan budidaya.
 - d. Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan perikanan budidaya
 - e. Memperluas cakupan pasar hasil perikanan budidaya
 - f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perikanan budidaya
 - g. Mengendalikan fungsi lahan perikanan budidaya
 - h. Meningkatkan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan budidaya

3. Persentase peningkatan produktivitas peternakan
 - a. Meningkatkan sarana-prasarana pengelolaan budidaya peternakan
 - b. Menerapkan metode budidaya ternak
 - c. Meningkatkan teknologi pengolahan peternakan.
 - d. Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan peternakan
 - e. Memperluas cakupan pasar hasil peternakan
 - f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk peternakan
 - g. Mengendalikan fungsi lahan peternakan
 - h. Meningkatkan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang peternakan
4. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
 - a. Meningkatkan sarana-prasarana pengelolaan kesehatan hewan
 - b. Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan peternakan
 - c. Meningkatkan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner
 - d. Mengendalikan Penyakit Hewan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI RPJMD : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023				
MISI RPJMD : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Tangkap :	Produksi Perikanan Tangkap :
			a. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan perikanan tangkap	a. Meningkatkan sarana-prasarana pengelolaan perikanan tangkap
			b. Pengawasan penangkapan ikan di Perairan Umum Darat (PUD)	b. Melaksanakan Pengawasan penangkapan ikan di Perairan Umum Darat (PUD)
			c. Peningkatan teknologi pengolahan perikanan tangkap	c. Meningkatkan teknologi pengolahan perikanan tangkap
			d. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan perikanan tangkap	d. Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan perikanan tangkap
			e. Perluasan cakupan pasar hasil perikanan tangkap	e. Memperluas cakupan pasar hasil perikanan tangkap
			f. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan tangkap	f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perikanan tangkap
			g. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan tangkap	g. Meningkatkan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan tangkap
			Produksi Perikanan Budidaya :	Produksi Perikanan Budidaya :
			a. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan perikanan budidaya	a. Meningkatkan sarana-prasarana pengelolaan perikanan budidaya
			b. Penerapan metode budidaya ikan	b. Menerapkan metode budidaya ikan

			c. Peningkatan teknologi pengolahan perikanan budidaya	c. Meningkatkan teknologi pengolahan perikanan budidaya
			d. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan perikanan budidaya	d. Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan perikanan budidaya
			e. Perluasan cakupan pasar hasil perikanan budidaya	e. Memperluas cakupan pasar hasil perikanan budidaya
			f. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan budidaya	f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perikanan budidaya
			g. Pengendalian fungsi lahan perikanan budidaya	g. Mengendalikan fungsi lahan perikanan budidaya
			h. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan budidaya	h. Meningkatkan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan budidaya
		Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas peternakan :	Persentase peningkatan produktivitas peternakan :
			a. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan budidaya peternakan	a. Meningkatkan sarana-prasarana pengelolaan budidaya peternakan
			b. Penerapan metode budidaya ternak	b. Menerapkan metode budidaya ternak
			c. Peningkatan teknologi pengolahan peternakan	c. Meningkatkan teknologi pengolahan peternakan.
			d. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan peternakan	d. Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan peternakan
			e. Perluasan cakupan pasar hasil peternakan	e. Memperluas cakupan pasar hasil peternakan
			f. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk peternakan	f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk peternakan

			g. Pengendalian fungsi lahan peternakan	g. Mengendalikan fungsi lahan peternakan
			h. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang peternakan	h. Meningkatkan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang peternakan
		Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis :	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis :
			a. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan kesehatan hewan	a. Meningkatkan sarana-prasarana pengelolaan kesehatan hewan
			b. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan peternakan	b. Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan peternakan
			c. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner	c. Meningkatkan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner
			d. Pengendalian Penyakit Hewan	d. Mengendalikan Penyakit Hewan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang pertama dengan tujuan Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang sejahtera melalui pengelolaan perikanan dan peternakan yang semakin produktif dan terjangkau. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan adalah meningkatkan produktivitas perikanan dan peternakan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan periode 2021-2023 adalah sebagai berikut :

A. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan (Penunjang Urusan atau melengkapi pada semua OPD)

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 1) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - 2) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 5) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program, kegiatan, dan Subkegiatan Utama/Teknis (Program Teknis/Program Prioritas)

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
 - 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - 2) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - 3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
 - b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - 2) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - 3) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
 - c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - 1) Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - 2) Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
 - 2) Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
 - e. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

- 2) Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
- f. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
 - 2) Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
2. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
 - 1) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
 - 2) Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
 - 1) Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
 - 2) Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

- b. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - 1) Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - 2) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - 3) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
 - 4) Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- c. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - 1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 4) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 5) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
 - 6) Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
 - 7) Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
- 4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - 1) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - 1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

- c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - 2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
 - 2) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - 3) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
 - c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
 - 2) Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
 - d. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
 - 1) Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
 - 2) Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
 - e. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
 - 2) Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
 - 3) Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
 - 4) Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan

- 5) Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
- f. Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Lain
 - 1) Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - 2) Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - 2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - 4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
 - 5) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 - c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
 - 2) Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
 - d. Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
 - 1) Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum
 - 2) Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum
 - 3) Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum
7. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - a. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
 - 2) Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

- 3) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
 - b. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - 1) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
 - c. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
 - 2) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - 2) Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
 - b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
 - 2) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
 - 3) Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
 - 2) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
 - d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
 - 2) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
 - 3) Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis
 - 4) Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

- e. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
 - 1) Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
 - 2) Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya
- 9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - 1) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
 - 2) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

6.2 Pendanaan

Sumber-sumber pendanaan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun adalah berasal dari :

- a. APBD Kabupaten Sumedang
- b. APBD Provinsi Jawa Barat
- c. APBN
- d. Dana Sosial
- e. Dana CSR
- f. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
- g. Kerjasama dengan Media untuk promosi
- h. Sumber dana lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

**Tabel 6.1.a. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
(Sebelum Perubahan)**

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rumus Perhitungan Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		Kondisi Akhir Periode	
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN										
		Program Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan:	Jumlah produksi ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan yang tercatat				4.625.000.000		6.618.750.000		11.243.750.000
			1. Ikan Konsumsi		Ton	8.286	8.617		9.014		9.014	
			2. Ikan Hias		Ekor	612.470	636.969		666.269		666.269	
			3. Benih Ikan		Ribu Ekor	179.275	186.446		195.023		195.023	
		Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah induk ikan (ekor)			0 dari 45.935	6.500	100.000.000	8.500	200.000.000	15.000	300.000.000
		Pengembangan pembesaran ikan unggulan	jumlah benih (ribu ekor)			0 dari 240.000	48.000	75.000.000	48.000	100.000.000	96.000	175.000.000
		Pengembangan mina padi	Jumlah ikan (ribu ekor)			0 dari 400.000	60.000	75.000.000	85.000	100.000.000	145.000	175.000.000
		Pengembangan budidaya ikan hias	Jumlah Ikan (ekor)			0 dari 2.000	-	-	500	75.000.000	500	75.000.000
		Pengembangan perikanan di lahan marginal	Jumlah ikan (ekor)			0 dari 40.000	-	-	10.000	75.000.000	10.000	75.000.000
	Pengelolaan Balai Benih Ikan	Jumlah pakan (kg)			0 dari 14.250	2.850	100.000.000	2.850	105.000.000	5.700	205.000.000	
	Pembangunan sarana dan prasarana	Jumlah Sarpras (unit)			8 dari 20	-	-	5	175.000.000	5	175.000.000	
	Pengembangan sistem informasi perikanan	Jumlah Dokumen			0 dari 5	1	100.000.000	1	105.000.000	2	205.000.000	
	Peningkatan hasil produksi perikanan tangkap	Jumlah sarpras (unit)			0 dari 100	-	-	25	200.000.000	25	200.000.000	
	Penyusunan regulasi bidang perikanan	Draft (dokumen)			0 dari 4	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rumus Perhitungan Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		Kondisi Akhir Periode	
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/ Kota)	Jumlah UPTD (Unit)			0 dari 1	1	1.849.000.000	1	1.941.450.000	2	3.790.450.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarpras (unit)			0 dari 4	1	1.651.000.000	1	1.733.550.000	2	3.384.550.000
		Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil Tembakau melalui Pengembangan	Jumlah Kelompok			28 dari 103	15	675.000.000	15	708.750.000	30	1.383.750.000
		Kajian Pengembangan Keramba Jaring Apung (KJA) Ramah Lingkungan	Draft (dokumen)			0 dari 1	-	-	1	500.000.000	1	500.000.000
		Kajian Pengembangan Budidaya Ikan Kancra menggunakan <i>Flow Through System</i>	Draft (dokumen)			0 dari 1	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000
		Budidaya dengan <i>Recirculating Aquaculture System (RAS) / Bioflock</i>	Draft (dokumen)			0 dari 1	-	-	1	300.000.000	1	300.000.000
		Pembenihan Ikan Kancra System Kawin Suntik (<i>Induce Breeding</i>)	Draft (dokumen)			0 dari 1	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rumus Perhitungan Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		Kondisi Akhir Periode	
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah unit pengolahan dan pemasaran perikanan yang terbina	Jumlah unit pengolahan dan pemasaran perikanan yang terbina	Unit	45	48	175.000.000	52	555.000.000	52	730.000.000
		Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (POKLAHSAR) Hasil Perikanan	Jenis Produk			0 dari 8		100.000.000	2	105.000.000	2	205.000.000
		Promosi dan Pameran Produk Perikanan	Jumlah kegiatan promosi			0 dari 4		75.000.000	1	100.000.000	1	175.000.000
		Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil Tembakau melalui Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Jumlah kelompok			0 dari 24	-	-	6	250.000.000	6	250.000.000
		Kajian Pengolahan (Standarisasi Pembuatan Kecap Ikan dan Tepung Tulang Ikan)	Draft (dokumen)			0 dari 1		-	1	100.000.000	1	100.000.000
		Program kesehatan lingkungan ikan dan konservasi	Persentase kelestarian lingkungan budidaya perikanan	Terpantau-nya lingkungan budidaya ikan dan konservasi	Persen	100	100	280.000.000	100	1.036.500.000	100	1.316.500.000
		Pembinaan dan pengendalian lingkungan kesehatan ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan			26 dari 316	58	150.000.000	58	350.000.000	116	500.000.000

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rumus Perhitungan Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		Kondisi Akhir Periode	
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Pengawasan lingkungan sumberdaya perairan pada kelompok Pokmaswas	Jumlah kelompok Pokmaswas			0 dari 25	5	130.000.000	5	136.500.000	10	266.500.000
		Penebaran ikan di perairan umum	Jumlah ikan (ekor)			0 dari 75.000.000		-	18.750.000	150.000.000	18.750.000	150.000.000
		Penyediaan sarana dan Prasarana laboratorium perikanan	Jumlah Sarpras (paket)			0 dari 4		-	1	200.000.000	1	200.000.000
		Fasilitasi sarana dan prasarana Pokmaswas	Jumlah Sarpras (paket)			0 dari 25		-	7	200.000.000	7	200.000.000
URUSAN PERTANIAN												
2	Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Persentase pengendalian penyakit hewan	Persentase pengendalian Penyakit Hewan	persen	100	100	100.000.000	100	105.000.000	100	205.000.000
		Pemeliharaan kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	Jumlah hewan (ekor)			0 dari 157.000	31.400	100.000.000	31.400	105.000.000	62.800	205.000.000
		Penyediaan klinik kesehatan hewan	Jumlah klinik (unit)			1 dari 4		-	-	-	-	-
		Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jaminan keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Pengujian sampel bahan pangan asal hewan	Persen	100	100	100.000.000	100	405.000.000	100	505.000.000
		Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah Pelaku usaha			0 dari 300	60	100.000.000	60	105.000.000	120	205.000.000

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rumus Perhitungan Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		Kondisi Akhir Periode	
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Penyediaan Sarana Prasarana Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sarpras (unit)			0 dari 4		-	1	300.000.000	1	300.000.000
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak:	Jumlah populasi ternak yang tercatat				2.749.150.000		7.137.300.000		9.886.450.000
			1. Sapi potong		Ekor	29.783	31.064		32.586		32.586	
			2. Sapi perah		Ekor	4.149	4.327		4.539		4.539	
			3. Kambing		Ekor	27.957	29.159		30.588		30.588	
			4. Domba		Ekor	111.324	116.111		121.800		121.800	
			5. Ayam buras		Ekor	519.506	541.845		568.395		568.395	
			6. Ayam ras petelur		Ekor	111.883	116.694		122.412		122.412	
			7. Ayam ras pedaging		Ekor	2.866.495	2.989.754		3.136.252		3.136.252	
			8. Itik		Ekor	49.553	51.684		54.216		54.216	
			Jumlah produksi peternakan:	Jumlah produksi peternakan yang tercatat								
			1. Daging		Ton	15.474	16.139		16.930		16.930	
			2. Telur		Ton	1.639	1.709		1.793		1.793	
			3. Susu		Ton	12.323	12.853		13.483		13.483	
		Pengembangan usaha pembibitan ternak	Jumlah Ternak (ekor)			0 dari 2.456	12	200.000.000	611	2.103.300.000	623	2.303.300.000
		Pengembangan usaha penggemukan ternak;	Jumlah Ternak (ekor)			0 dari 100		-	25	450.000.000	25	450.000.000
		Pengembangan Budidaya Unggas	Jumlah Ternak (ekor)			0 dari 54.000		-	13.500	900.000.000	13.500	900.000.000
		Peningkatan sarana prasarana peternakan	Jumlah sarpras (unit)			0 dari 100		-	25	300.000.000	25	300.000.000
		Perluasan dan Peningkatan Kualitas Pakan Ternak;	Luas lahan (Ha)			8 dari 100		-	23	350.000.000	23	350.000.000

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rumus Perhitungan Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		Kondisi Akhir Periode	
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Pengembangan sistem informasi peternakan	Dokumen			0 dari 4		100.000.000	1	105.000.000	1	205.000.000
		Penyusunan rencana pembangunan peternakan	Dokumen			0 dari 1		50.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000
		Pembinaan Peternak Penerima Bantuan Pemerintah dan Masyarakat	Jumlah kelompok			0 dari 200		40.000.000	50	100.000.000	50	140.000.000
		Penyusunan regulasi bidang peternakan	Draft			0 dari 2		-	1	150.000.000	1	150.000.000
		Optimalisasi Inseminasi Buatan	Jumlah Ternak Terlayani IB (Ekor)			11.317 dari 56.585	14.500	75.000.000	11.317	80.000.000	25.817	155.000.000
		Penguatan Ekonomi Masyarakat Industri Hasil tembakau melalui Pengembangan Peternakan	Jumlah Kelompok			78 dari 153	15	1.000.000.000	15	1.050.000.000	30	2.050.000.000
		Pembangunan/ Perbaikan Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	Jumlah UPTD (unit)			0 dari 4	1	1.284.150.000	1	1.349.000.000	1	2.633.150.000

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rumus Perhitungan Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		Kondisi Akhir Periode	
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Pembangunan Sumber-Sumber Air (Irigasi Air Tanah Dangkal dan Dalam, Embung Dam Parit, Long Storages dan Pintu Air)	Jumlah Kelompok			0 dari 20	-	-	5	550.000.000	5	550.000.000
		Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina	Unit	75	84	182.500.000	100	477.500.000	#REF!	660.000.000
		Pembinaan dan Pengembangan pengolahan hasil peternakan	Jumlah produk			2 dari 10	2	50.000.000	2	52.500.000	4	102.500.000
		Promosi Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Jumlah kegiatan			0 dari 10	2	92.500.000	2	100.000.000	4	192.500.000
		Pengembangan Kemitraan Usaha Peternakan	Jumlah pelaku usaha			0 dari 60	10	40.000.000	12	50.000.000	22	90.000.000
		Pengembangan legalitas dan sertifikasi produk olahan hasil peternakan	Jumlah produk			0 dari 10	-	-	2	75.000.000	2	75.000.000
		Fasilitasi asuransi usaha ternak sapi dan kerbau	Jumlah ternak			1.000 dari 5.000	-	-	1.000	100.000.000	1.000	100.000.000
		Penyediaan Pasar Hewan;	Jumlah tempat			0 dari 1	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000
		Penyediaan Rumah Potong Hewan;	Jumlah tempat			0 dari 1	-	-	-	-	1	-

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rumus Perhitungan Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		Kondisi Akhir Periode	
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		PROGRAM - PROGRAM GENERIK / UMUM						1.662.610.000		2.021.541.000		3.684.151.000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Adminsitiasi yang terlayani / Jumlah Pelayanan Adminsitiasi X 100%	persen	100	100	925.850.000	100	971.400.000	100	1.897.250.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air			0 dari 60	12	116.000.000	12	121.800.000	24	237.800.000
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pembayaran jasa pelayanan administrasi perkantoran (bulan)			0 dari 60	12	159.750.000	12	168.000.000	24	327.750.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembayaran bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			0 dari 60	12	20.280.000	12	21.294.000	24	41.574.000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi wilayah Jawa Barat dan luar wilayah Jawa			0 dari 60	12	112.220.000	12	117.831.000	24	230.051.000
		Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah pembayaran Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi			0 dari 30	6	36.500.000	6	38.325.000	12	74.825.000
		Penyediaan Jasa Tenaga Operasional	Jumlah unit kerja yang diamankan			0 dari 30	6	160.200.000	6	169.200.000	12	329.400.000
		Penyediaan Administrasi	Jumlah UPTD (Unit)			0 dari 65	13	275.000.000	13	288.750.000	26	563.750.000

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rumus Perhitungan Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		Kondisi Akhir Periode	
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah unit kerja yang mendapat pelayanan jasa kebersihan			0 dari 25	5	45.900.000	5	46.200.000	10	92.100.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (persen)	(Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun n - Jumlah Sarana Prasarana Tahun (n-1)) / Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun (n-1) x 100%	persen	0 dari 100	100	505.620.000	100	840.301.000	100	1.345.921.000
		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun			0 dari 1	-	-	1	90.000.000	1	90.000.000
		Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/ dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan / dinas (paket)			0 dari 2	-	-	1	20.000.000	1	20.000.000
		Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor (paket)			0 dari 5	1	100.000.000	1	105.000.000	2	205.000.000
		Penataan halaman kantor/ gedung kantor	Jumlah halaman kantor/ gedung kantor yang			0 dari 2	-	-	1	30.000.000	1	30.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara			0 dari 4	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			0 dari 5	1	55.000.000	1	57.750.000	2	112.750.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion	Jumlah Kedaraan dinas yang terpelihara (unit)			0 dari 390	78	315.470.000	78	331.243.500	156	646.713.500

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rumus Perhitungan Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		Kondisi Akhir Periode	
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang terpelihara			0 dari 5	1	23.150.000	1	24.307.500	2	47.457.500
		Penyediaan Jasa Sewa Kantor/ Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Komputer	Jumlah Kantor/ Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Komputer yang			0 dari 5	1	12.000.000	1	12.000.000	2	24.000.000
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah Rumah Jabatan/ Dinas yang direhabilitasi			0 dari 1	-	-	1	160.000.000	1	160.000.000
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi			0 dari 3	-	-	-	-	-	-
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase cakupan disiplin aparatur	Jumlah Aparatur yg Disiplin / Jumlah seluruh Aparatur x 100 %	persen	0 dari 100	100	150.000.000	100	78.750.000	100	228.750.000
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapan (paket)			0 dari 3	1	75.000.000	-	-	1	75.000.000
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (paket)			0 dari 4	1	75.000.000	1	78.750.000	2	153.750.000

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rumus Perhitungan Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		Kondisi Akhir Periode	
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	Persentase Cakupan Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	Jumlah Aparatur Pindah atau Purna Tugas / Jumlah Aparatur x 100%	persen	100	100	5.000.000	100	5.250.000	100	10.250.000
		Pemberian Tanda Mata untuk Pegawai Purna Tugas	Jumlah pemberian Tanda Mata untuk Pegawai Purna Tugas (paket)			0 dari 5	1	5.000.000	1	5.250.000	2	10.250.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya/ jumlah aparatur x 100%	persen	100	100	-	100	46.000.000	100	46.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)			0 dari 25	-	-	6	46.000.000	6	46.000.000
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah yang mengikuti taklim aparatur (orang)			50 dari 50	50	7.500.000	50	42.000.000	50	49.500.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah pelaporan yang sesuai dengan ketentuan/ jumlah seluruh laporan x 100%	persen	100	100	41.300.000	100	45.000.000	100	86.300.000
		Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jenis dokumen yang dihasilkan (dokumen)			0 dari 25	5	18.100.000	5	20.000.000	10	38.100.000

No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rumus Perhitungan Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	2019		2020		Kondisi Akhir Periode	
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan			0 dari 5	1	23.200.000	1	25.000.000	2	48.200.000
		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Jumlah unit kegiatan yang sesuai antara perencanaan dan penganggaran / jumlah seluruh kegiatan x 100%	persen	100	100	25.340.000	100	25.340.000	100	69.680.000
		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jenis dokumen yang dihasilkan (dokumen)			0 dari 25	5	25.340.000	5	25.340.000	10	50.680.000
		Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persentase Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Jumlah administrasi kepegawaian yang dapat dikelola / jumlah seluruh administrasi kepegawaian x 100%	persen	100	100	9.500.000	100	9.500.000	100	19.000.000
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola (Dokumen)			0 dari 10	2	9.500.000	2	9.500.000	4	19.000.000

TABEL 6.1 b. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SUMEDANG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Terwujudnya Pengembangan Wilayah Ekonomi Kabupaten Sumedang melalui Peningkatan Produktivitas Perikanan dan Peternakan	Meningkatnya produktivitas hasil perikanan dan peternakan	Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan				3,48	Persen	5,20	1.550.000.000	5,20	1.550.000.000		
			3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan :				850.000.000	850.000.000	
						1. Ikan Konsumsi	9.269 Ton	9.483					
						2. Ikan Hias	670.553 Ekor	700.915					
						3. Benih Ikan	197.969 Ribu Ekor	205.164					
			3	25	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan	Unit	7	350.000.000	12	350.000.000
			3	25	03	2.01	01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi Sumber Daya Ikan	Dokumen	-	-	-	-
			3	25	03	2.01	02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000
			3	25	03	2.01	03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	6	200.000.000	6	200.000.000
			3	25	03	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	Orang	60	400.000.000	60	400.000.000
			3	25	03	2.02	01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang dibina	Orang	60	100.000.000	60	100.000.000
			3	25	03	2.02	02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang dibentuk	Kelompok	2	100.000.000	2	100.000.000
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang dikembangkan	Kelompok	3	-	3	-	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
						TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
						CAPAIAN	SATUAN	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 25 03 2.02 03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang mendapat Bantuan Pendanaan	Kelompok	3	200.000.000	3	200.000.000			
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang mendapat Bantuan Pembiayaan	Kelompok	3	-	3	-			
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang mendapat Bantuan Kemitraan Usaha	Kelompok	3	-	3	-			
			3 25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Persen	100	100.000.000	100	100.000.000			
			3 25 03 2.03 01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Prosedur Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000			
					Jumlah Prosedur Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	-	-	-	-			
			3 25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pelayanan	Tempat	-	-	-	-			
			3 25 03 2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan	Tanda Daftar	-	-	-	-			
			3 25 03 2.04 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah persyaratan yang ditetapkan	Dokumen	-	-	-	-			
					Jumlah prosedur yang ditetapkan	Dokumen	-	-	-	-			
			3 25 03 2.04 02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah layanan Tanda Daftar Kapal Perikanan	Layanan	-	-	-	-			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 25 03 2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan kapal pengangkut ikan yang diterbitkan		Izin	-	-	-	-		
			3 25 03 2.05 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah persyaratan pengadaan yang ditetapkan		Dokumen	-	-	-	-		
					Jumlah prosedur persetujuan pengadaan yang ditetapkan		Dokumen	-	-	-	-		
			3 25 03 2.05 02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah layanan penerbitan persetujuan		Layanan	-	-	-	-		
			3 25 03 2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar		Unit	-	-	-	-		
			3 25 03 2.06 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan pendaftaran yang ditetapkan		Dokumen	-	-	-	-		
			3 25 03 2.06 02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah layanan pendaftaran		Layanan	-	-	-	-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 25 05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kelestarian lingkungan budidaya perikanan	100	Persen	100	700.000.000	100	700.000.000		
			3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		Persen	100	700.000.000	100	700.000.000		
			3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		Kali	12	300.000.000	12	300.000.000		
			3 25 05 2.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	25	Kali	12	400.000.000	12	400.000.000		
		Laju pertumbuhan Subsektor Perikanan				3,48	Persen	5,20	3.050.000.000	5,20	3.050.000.000		
			3 25 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan :				2.650.000.000	#REF!	2.650.000.000		
					1. Ikan Konsumsi	9.269	Ton	9.483					
					2. Ikan Hias	670.553	Ekor	700.915					
					3. Benih Ikan	197.969	Ribu Ekor	205.164					
			3 25 04 2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Izin Usaha Perikanan Diterbitkan di Bidang Pembudidayaan Ikan		Unit Usaha	-	-	-	-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE			PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI		
								CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
										TARGET	RP.	TARGET	RP.				
			3	25	04	2.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Persyaratan dan Prosedur yang Diterbitkan		Dokumen	-	-	-	-		
			3	25	04	2.01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Pelayanan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan		Layanan	-	-	1	-		
			3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang Diberdayakan		Kelompok	-	-	-	-		
			3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Dikembangkan Kapasitasnya		Kelompok	-	-	-	-		
			3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Dibentuk		Kelompok	-	-	-	-		
									Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Dikembangkan		Kelompok	-	-	-	-		

INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
								CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	RP.	TARGET	RP.		
	3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mendapat Bantuan Pendanaan		Kelompok	-	-	-	-		
							Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mendapat Bantuan Pembiayaan		Kelompok	-	-	-	-		
							Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mendapat Bantuan Kemitraan Usaha		Kelompok	-	-	-	-		
	3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil Ikan yang Mendapat Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Kelompok	-	-	-	-		
	3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)		TDPIK	-	-	-	-		
	3	25	04	2.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK)		Dokumen	-	-	1	-		
	3	25	04	2.03	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK)		Layanan	-	-	-	-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Persen	100	2.650.000.000	100	2.650.000.000		
			3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan		Dokumen	-	-	-	-		
			3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan		Unit	-	-	-	-		
			3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan		Unit	3	2.500.000.000	3	2.500.000.000		
			3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok		Kelompok	40	150.000.000	40	150.000.000		
			3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Kelompok Pembudidayaan Ikan yang Dibina dan Dipantau		Kelompok	-	-	-	-		
			3 25 04 2.04 06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen		Dokumen	-	-	-	-		
			3 25 04 2.04 07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen		Dokumen	-	-	-	-		
			3 25 06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah unit pengolahan dan pemasaran perikanan yang terbina		52 Unit	56	400.000.000	56,00	400.000.000		
			3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Tanda Daftar	-	-	-	-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI	
									CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
											TARGET	RP.	TARGET	RP.			
			3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Perikanan		Dokumen	-	-	-	-		
			3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Unit Usaha	56	150.000.000	56	150.000.000		
			3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha yang Dibimbing		Unit Usaha	20	150.000.000	20	150.000.000		
									Jumlah Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan atau Standar		Unit Usaha	5	-	5	-		
			3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang Tersedia dan Tersalurkan		Persen	100	250.000.000	100	250.000.000		
			3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan		Persen	2	100.000.000	2	100.000.000		
			3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas yang Diberikan bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil		Unit Usaha	3	150.000.000	3	150.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI	
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
								TARGET	RP.	TARGET	RP.			
		Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan				5,78	Persen	5,50	15.475.000.000	5,50	15.475.000.000			
			3	27	02									
						Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah populasi ternak:	Ekor		7.100.000.000		7.100.000.000		
						1. Sapi potong	34.915		34.378		34.378,01			
						2. Sapi perah	3.703		4.789		4.789,12			
						3. Kambing	36.913		32.270		32.270,29			
						4. Domba	95.135		128.499		128.499,39			
						5. Ayam buras	612.943		599.657		599.656,88			
						6. Ayam ras petelur	542.778		129.145		129.144,63			
						7. Ayam ras pedaging	2.580.280		3.308.746		3.308.746,12			
						8. Itik	81.393		57.198		57.198,18			
						Jumlah produksi peternakan:		Ton			-			
						1. Daging	22384,741		17.861		17.861,37			
						2. Telur	6758,502		1.892		1.891,87			
						3. Susu	8618,592		14.224		14.224,23			
			3	27	02	2.01			12	2.000.000.000	12	2.000.000.000		
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Sarana Pertanian	Kali						
			3	27	02	2.01	01			-	-	-	-	
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Peternakan sesuai dengan Komoditas	Kali						
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Peternakan sesuai dengan Teknologi	Kali						
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Peternakan sesuai dengan Spesifik Lokasi	Kali						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI	
									CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
											TARGET	RP.	TARGET	RP.			
			3	27	02	2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Jenis Obat Hewan yang Diawasi di Tingkat Pengecer		Jenis	-	-	-	-			
			3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Obat Hewan yang Beredar yang Diperiksa Mutu, Khasiat dan Keamanannya		Jenis	-	-	-	-		
			3	27	02	2.04	02	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penindakan atas penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan		Penindakan	-	-	-	-		
			3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persen	-	-	-	-		
			3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Dijamin Peredarannya		Jenis	-	-	-	-		
			3	27	02	2.05	02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Jumlah Benih dan Bibit Ternak yang Diuji Mutunya		Jenis	-	-	-	-		
			3	27	02	2.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Diawasi Peredaran dan Sertifikasinya		Jenis	-	-	-	-		
			3	27	02	2.05	04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT dan Bahan Pakan/Pakan yang Dijamin Peredarannya		Jenis	-	-	-	-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI	
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
								TARGET	RP.	TARGET	RP.			
			3 27 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dikendalikan Penyediaannya		Jenis	-	-	-	-			
			3 27 02 2.05 06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Diawasi		Jenis	-	-	-	-			
			3 27 02 2.06	Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Lain	Jumlah Benih / Bibit Ternak yang Disediakan		Ekor	65	600.000.000	65	600.000.000			
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Disediakan		Kg	428.500		428.500				
			3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Ternak yang Disediakan		Ekor	65	400.000.000	65	400.000.000			
			3 27 02 2.06 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak		Kg	428.500	200.000.000	428.500	200.000.000			
			3 27 03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Populasi Ternak :		Ekor		8.300.000.000		8.300.000.000			
					1. Sapi potong			34.915		34.378		34.378,01		
					2. Sapi perah			3.703		4.789		4.789,12		
					3. Kambing			36.913		32.270		32.270,29		
					4. Domba			95.135		128.499		128.499,39		
					5. Ayam buras			612.943		599.657		599.656,88		
					6. Ayam ras petelur			542.778		129.145		129.144,63		
					7. Ayam ras pedaging			2.580.280		3.308.746		3.308.746,12		
					8. Itik			81.393		57.198		57.198,18		
					Jumlah produksi peternakan:		Ton					-		
					1. Daging			22384,741		17.861		17.861,37		
					2. Telur			6758,502		1.892		1.891,87		
					3. Susu			8618,592		14.224		14.224,23		
			3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dikembangkan					-	-	-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Dokumen	-	-	-	-		
			3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun		Unit	1	8.000.000.000	1	8.000.000.000		
			3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan / atau Dipelihara		Unit	-	-	-	-		
			3 27 03 2.02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan / atau Dipelihara		Unit	-	-	-	-		
			3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan / atau Dipelihara		Unit	-	-	-	-		
			3 27 03 2.02 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan / atau Dipelihara		Unit	1	7.000.000.000	1	7.000.000.000		
			3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan / atau Dipelihara		Unit	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
			3 27 03 2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dikelola		Wilayah	-	-	-	-		
			3 27 03 2.03 01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilakukan Pelestarian dan Pemanfaatan		Wilayah	-	-	-	-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
									TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									CAPAIAN	SATUAN	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3	27	03	2.03	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Diawasi		Wilayah	-	-	-	-			
			3	27	03	2.04		Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Lokasi Lahan Pengembalaan Umum yang Dikembangkan		Lokasi	8	300.000.000	8	300.000.000			
			3	27	03	2.04	01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Lokasi Lahan Pengembalaan Umum yang Didentifikasi dan Ditetapkan		Lokasi	-	-	-	-			
			3	27	03	2.04	02	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Lokasi Lahan Pengembalaan Umum yang Dikelola		Lokasi	8	300.000.000	8	300.000.000			
			3	27	03	2.04	03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Lokasi Lahan Pengembalaan Umum yang Dibina dan Diawasi		Lokasi	-	-	-	-			
			3	27	06			Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina	104	Unit Usaha	124	75.000.000	124,00	75.000.000			
			3	27	06	2.01		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan		Izin Usaha	10	75.000.000	10	75.000.000			
			3	27	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Peternakan yang Disusun		Dokumen	-	-	-	-			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
										CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
												TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Unit Usaha Peternakan yang Diberi Penilaian Kelayakan dan Diberi Pertimbangan Teknis Izin Usaha		Unit Usaha	10	75.000.000	10	75.000.000		
			3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Unit Usaha Peternakan yang Dibina dan Diawasi Penerapan Izin Usahnya		Unit Usaha	-	-	-	-		
			3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang Diterbitkan		Rekomendasi Izin usaha	-	-	-	-		
			3	27	06	2.02	01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Proses Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		Proses Rekomendasi Izin Usaha	-	-	-	-		
			3	27	06	2.02	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Unit Usaha yang Diawasi Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan		Unit Usaha	-	-	-	-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE			PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI	
								CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
										TARGET	RP.	TARGET	RP.			
			3	27	06	2.02	03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Unit Usaha yang Diawasi Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Unit Usaha	-	-	-	-		
			3	27	06	2.02	04	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Jumlah Unit Usaha yang Diawasi Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Unit Usaha	-	-	-	-		
			3	27	06	2.02	05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Unit Usaha yang Diawasi Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Unit Usaha	-	-	-	-		
			3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang Diterbitkan	Unit Usaha	-	-	-	-		
			3	27	06	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Layanan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Unit Usaha	-	-	-	-		
			3	27	06	2.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Pengecer Obat Hewan yang Diawasi Pelaksanaan Izin Usahanya	Unit Usaha	-	-	-	-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
									CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		Laju pertumbuhan Subsektor Peternakan						5,78	Persen	5,50	725.000.000	5,50	725.000.000			
			3	27	04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian penyakit hewan	100	persen	100	725.000.000	100,00	725.000.000		
								Persentase Jaminan keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	100	persen	100		100,00			
			3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaminan Kesehatan Hewan		Persen	100	250.000.000	100	250.000.000		
			3	27	04	2.01	01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan		Ekor	35.000	250.000.000	35.000	250.000.000		
			3	27	04	2.01	02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyakit		Jenis	-	-	-	-		
			3	27	04	2.01	03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Lokasi		Lokasi	-	-	-	-		
			3	27	04	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		Persen	-	-	-	-		
			3	27	04	2.02	01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Dokumen Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan		Dokumen	-	-	-	-		
			3	27	04	2.02	02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis		Kali	-	-	-	-		
			3	27	04	2.02	03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang Diperiksa di Perbatasan		Ekor	-	-	-	-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
									CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3	27	04	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner		Persen	100	100.000.000	100	100.000.000		
			3	27	04	2.03	01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium		Unit	-	-	-	-		
			3	27	04	2.03	02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Unit	1	100.000.000	1	100.000.000		
			3	27	04	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis		Unit	10	375.000.000	10	375.000.000		
								Jumlah Unit Usaha yang Diawasi		Unit	10		10	-		
			3	27	04	2.04	01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang Didampingi		Unit	10	75.000.000	10	75.000.000		
			3	27	04	2.04	02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Hewan dan Produk Hewan		Kali	20	300.000.000	20	300.000.000		
			3	27	04	2.04	03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah Dokumen Persyaratan Teknis yang Ditetapkan		Dokumen	-	-	-	-		
			3	27	04	2.04	04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sample PAH yang Diuji		Sample	-	-	-	-		
			3	27	04	2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis		Unit	-	-	-	-		
								Jumlah Unit Usaha yang Diawasi		Unit	-	-	-	-		
			3	27	04	2.05	01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Unit Usaha yang Didampingi		Unit	-	-	-	-		
			3	27	04	2.05	02 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran yang Ditangani		Penanganan	-	-	-	-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
						TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
						CAPAIAN	SATUAN	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 27 05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian penyakit hewan	100	persen	-	-	-	-		
					Persentase jaminan keamanan Pangan Asal Hewan yang ASUH	100	persen	-	-	-	-		
			3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Kali	-	-	-	-		
			3 27 05 2.01 01	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Penanggulangan Bencana Non Alam		Kali	-	-	-	-		
			3 27 05 2.01 05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana		Kali	-	-	-	-		
			X XX 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	100	11.871.270.396	100,00	11.871.270.396		
			X XX 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33	dokumen	33	98.000.000	33	98.000.000		
			X XX 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	5	33.000.000	5	33.000.000		
			X XX 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	5	5.000.000	5	5.000.000		
			X XX 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	5	5.000.000	5	5.000.000		
			X XX 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	5	5.000.000	5	5.000.000		
			X XX 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	5	5.000.000	5	5.000.000		
			X XX 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	8	laporan	8	45.000.000	8	45.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
									CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	laporan	12	9.019.890.396	12	9.019.890.396		
			X	XX	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	laporan	12	8.989.890.396	12	8.989.890.396		
			X	XX	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		12	10.000.000	12	10.000.000		
			X	XX	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD	12	laporan	12	20.000.000	12	20.000.000		
								Laporan Tanggapan Pemeriksaan	-	laporan	2		2	-		
			X	XX	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000		
			X	XX	01	2.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000		
			X	XX	01	2.03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	-	bulan	12	10.000.000	12	10.000.000		
			X	XX	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	bulan	12	10.000.000	12	10.000.000		
			X	XX	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12	laporan	12	15.000.000	12	15.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			X XX 01 2.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000		
			X XX 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	laporan	12	5.000.000	12	5.000.000		
			X XX 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	laporan	1	181.190.000	1	181.190.000		
			X XX 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	paket	-	-	-	-		
			X XX 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian		laporan	2	5.000.000	2	5.000.000		
			X XX 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Laporan Pemulangan Pegawai yang pensiun	-	orang	5	50.000.000	5	50.000.000		
			X XX 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	orang	6	86.190.000	6	86.190.000		
			X XX 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	50	40.000.000	50	40.000.000		
			X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	laporan	12	379.000.000	12	379.000.000		
			X XX 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	laporan	12	60.000.000	12	60.000.000		
			X XX 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	laporan	12	60.000.000	12	60.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			X XX 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	laporan	12	40.000.000	12	40.000.000		
			X XX 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	laporan	12	29.000.000	12	29.000.000		
			X XX 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	150.000.000	12	150.000.000		
			X XX 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	bulan	12	5.000.000	12	5.000.000		
			X XX 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	laporan	1	35.000.000	1	35.000.000		
			X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Laporan	1	720.000.000	1	720.000.000		
			X XX 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	unit	1	350.000.000	1	350.000.000		
			X XX 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	unit	1	250.000.000	1	250.000.000		
			X XX 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	-	paket	1	70.000.000	1	70.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			X XX 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	unit	-	-	-	-		
			X XX 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	unit	1	50.000.000	1	50.000.000		
			X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Laporan	12	910.000.000	12	910.000.000		
			X XX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12	Laporan	12	75.000.000	12	75.000.000		
			X XX 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	12	85.000.000	12	85.000.000		
			X XX 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	12	750.000.000	12	750.000.000		
			X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Laporan	12	523.190.000	12	523.190.000		
			X XX 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Laporan	12	241.100.000	12	241.100.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI	
									CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-3		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
											TARGET	RP.	TARGET	RP.			
			X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000		
			X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Laporan	1	200.000.000	1	200.000.000		
			X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Laporan	1	57.090.000	1	57.090.000		
													28.896.270.396		28.896.270.396		

TABEL 6.1.c. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SUMEDANG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI		
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.				
1	2	3	4	5	6	7	14	15	16	17	18	19	20	21			
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Terwujudnya Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Tangkap				1.190	Ton	1.400,54	3.175.000.000	1.519,58	3.880.000.000	1.519,58	7.055.000.000				
			3 25 03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap	-	persen	100,00	2.125.000.000	100,00	2.630.000.000	100,00	4.755.000.000				
			3 25 03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan		Unit	10	550.000.000	10	780.000.000	12	1.330.000.000			
			3 25 03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000		
			3 25 03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Unit	1	200.000.000	1	400.000.000	3	600.000.000		
			3 25 03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Unit	8	250.000.000	10	280.000.000	10	530.000.000		
			3 25 03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan		Orang	80	500.000.000	80	600.000.000	80	1.100.000.000		
			3 25 03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang dibina		Orang	80	125.000.000	100	150.000.000	100	275.000.000		
			3 25 03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang dibentuk		Kelompok	2	125.000.000	2	150.000.000	4	275.000.000		
						Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang dikembangkan		Kelompok	3	-	4	-	10	-			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI		
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5				KONDISI KINERJA PADA AKHIR	
								TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
			3 25 03 2.02 03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang mendapat Bantuan Pendanaan		Kelompok	3	250.000.000	4	300.000.000	7	550.000.000		
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang mendapat Bantuan Pembiayaan		Kelompok	3	-	4	-	7	-		
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang mendapat Bantuan Kemitraan Usaha		Kelompok	3	-	4	-	7	-		
			3 25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan		Persen	100	350.000.000	100	400.000.000	100	750.000.000		
			3 25 03 2.03 01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Prosedur Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Dokumen	1	150.000.000	1	175.000.000	1	325.000.000		
					Jumlah Prosedur Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Dokumen		-		-		-		
			3 25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pelayanan		Tempat	1	200.000.000	1	225.000.000	1	425.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI
									CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR			
											TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3	25	03	2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan	Tanda Daftar	10	225.000.000	20	250.000.000	30	475.000.000			
			3	25	03	2.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah persyaratan yang ditetapkan	Dokumen	1	75.000.000	1	100.000.000	2	175.000.000		
								Jumlah prosedur yang ditetapkan	Dokumen	1	-	1	-	2	-			
			3	25	03	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah layanan Tanda Daftar Kapal Perikanan	Layanan	1	150.000.000	1	150.000.000	1	300.000.000		
			3	25	03	2.05		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan kapal pengangkut ikan yang diterbitkan	Izin	5	200.000.000	5	250.000.000	10	450.000.000		
			3	25	03	2.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah persyaratan pengadaan yang ditetapkan	Dokumen	1	50.000.000	1	75.000.000	2	125.000.000		
								Jumlah prosedur persetujuan pengadaan yang ditetapkan	Dokumen	1	-	1	-	2	-			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 25 03 2.05 02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah layanan penerbitan persetujuan		Layanan	1	150.000.000	1	175.000.000	1	325.000.000		
			3 25 03 2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar		Unit	10	300.000.000	10	350.000.000	20	650.000.000		
			3 25 03 2.06 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan pendaftaran yang ditetapkan		Dokumen	1	150.000.000	1	175.000.000	2	325.000.000		
			3 25 03 2.06 02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah layanan pendaftaran		Layanan	1	150.000.000	1	175.000.000	1	325.000.000		
			3 25 05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Kelestarian Sumberdaya Perikanan di Perairan Umum		Persen	100	1.050.000.000	100	1.250.000.000	100	2.300.000.000		
			3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		Persen	100	1.050.000.000	100	1.250.000.000	100	2.300.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
								TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
						CAPAIAN	SATUAN	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		Kali	12	600.000.000	12	750.000.000	12	1.350.000.000		
			3 25 05 2.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		Kali	12	450.000.000	12	500.000.000	12	950.000.000		
		Produksi Perikanan Budidaya				8.080	Ton	8.241,16	6.625.000.000	8.405,99	6.555.000.000	8.405,99	13.180.000.000		
			3 25 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya	-	persen	100,00	5.175.000.000	100,00	5.750.000.000	100,00	10.925.000.000		
			3 25 04 2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Izin Usaha Perikanan Diterbitkan di Bidang Pembudidayaan Ikan		Unit Usaha	1	175.000.000	2	225.000.000	2	400.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI			
									CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
											TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.	
			3	25	04	2.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Persyaratan dan Prosedur yang Diterbitkan		Dokumen	1	75.000.000	1	100.000.000	1	175.000.000		
			3	25	04	2.01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Pelayanan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan		Layanan	1	100.000.000	1	125.000.000	1	225.000.000		
			3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang Diberdayakan		Kelompok	31	650.000.000	31	725.000.000	62	1.375.000.000		
			3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Dikembangkan Kapasitasnya		Kelompok	6	100.000.000	6	125.000.000	12	225.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI
						PADA TAHUN AWAL		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR			
						CAPAIAN	SATUAN	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 25 04 2.02	02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Dibentuk		Kelompok	5	150.000.000	5	175.000.000	10	325.000.000		
					Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Dikembangkan		Kelompok	10	-	10	-	20	-		
			3 25 04 2.02	03 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mendapat Bantuan Pendanaan		Kelompok	5	300.000.000	5	300.000.000	10	600.000.000		
					Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mendapat Bantuan Pembiayaan		Kelompok	5	-	5	-	10	-		
					Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mendapat Bantuan Kemitraan Usaha		Kelompok	5	-	5	-	10	-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI	
									CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR				
											TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
			3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil Ikan yang Mendapat Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Kelompok	20	100.000.000	20	125.000.000	40	225.000.000		
			3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)		TDPIK	30	225.000.000	32	275.000.000	62	500.000.000		
			3	25	04	2.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK)		Dokumen	1	75.000.000	1	100.000.000	1	175.000.000		
			3	25	04	2.03	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK)		Layanan	1	150.000.000	1	175.000.000	2	325.000.000		
			3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Persen	100	4.125.000.000	100	4.525.000.000	100	8.650.000.000		
			3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan		Dokumen	1	100.000.000	1	105.000.000	2	205.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan		Unit	5	300.000.000	5	350.000.000	10	650.000.000		
			3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan		Unit	4	3.000.000.000	4	3.250.000.000	4	6.250.000.000		
			3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok		Kelompok	40	300.000.000	40	350.000.000	40	650.000.000		
			3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Kelompok Pembudidayaan Ikan yang Dibina dan Dipantau		Kelompok	50	125.000.000	50	150.000.000	50	275.000.000		
			3 25 04 2.04 06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen		Dokumen	1	150.000.000	1	160.000.000	2	310.000.000		
			3 25 04 2.04 07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen		Dokumen	1	150.000.000	1	160.000.000	2	310.000.000		
			3 25 06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		- persen	100,00	1.450.000.000	100,00	805.000.000	100,00	2.255.000.000		
			3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Tanda Daftar	30	100.000.000	34	100.000.000	64	200.000.000		
			3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Perikanan		Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Unit Usaha	60	200.000.000	64	250.000.000	64	450.000.000		
			3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha yang Dibimbing		Unit Usaha	20	200.000.000	24	250.000.000	64	450.000.000		
					Jumlah Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan atau Standar		Unit Usaha	5	-	6	-	16	-		
			3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang Tersedia dan Tersalurkan		Persen	100	1.150.000.000	100	455.000.000	100	1.605.000.000		
			3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan		Persen	2	150.000.000	2	200.000.000	2	350.000.000		
			3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas yang Diberikan bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil		Unit Usaha	4	1.000.000.000	5	255.000.000	12	1.255.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI		
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.				
	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas peternakan				67,10	Persen	5,18	19.000.000.000	5,18	15.800.000.000	5,18	34.800.000.000				
			3	27	02			-	persen	100,00	8.900.000.000	100,00	10.350.000.000	100,00	19.250.000.000		
			3	27	02	2.01			Kali	12	2.200.000.000	12	2.750.000.000	12	4.950.000.000		
			3	27	02	2.01	01		Kali	12	200.000.000	12	250.000.000	12	450.000.000		
									Kali	12	-	12	-	12	-		
									Kali	12	-	12	-	12	-		
			3	27	02	2.01	02		Kelompok	20	2.000.000.000	20	2.500.000.000	60	4.500.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas SDG Hewan yang Dikelola		Komoditas	4	450.000.000	4	600.000.000	7	1.050.000.000		
			3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Lokasi yang Dijamin Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan		Lokasi	1	100.000.000	1	150.000.000	-	250.000.000		
			3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Hewan yang Ditingkatkan Kualitas SDG-nya		Ekor	15	250.000.000	20	300.000.000	2.235	550.000.000		
			3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Hewan yang Dimanfaatkan SDG-nya		Ekor	5	100.000.000	10	150.000.000	10	250.000.000		
			3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan yang Ditingkatkan Mutu dan Peredarannya		Jenis	8	200.000.000	8	300.000.000	8	500.000.000		
			3 27 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		Kali	12	100.000.000	12	150.000.000	12	250.000.000		
			3 27 02 2.03 02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak		Kali	12	100.000.000	12	150.000.000	12	250.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 27 02 2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Jenis Obat Hewan yang Diawasi di Tingkat Pengecer		Jenis	8	200.000.000	8	300.000.000	8	500.000.000		
			3 27 02 2.04 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Obat Hewan yang Beredar yang Diperiksa Mutu, Khasiat dan Keamanannya		Jenis	8	100.000.000	8	150.000.000	8	250.000.000		
			3 27 02 2.04 02	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penindakan atas penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan		Penindakan	2	100.000.000	2	150.000.000	4	250.000.000		
			3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100	600.000.000	100	600.000.000	100	1.200.000.000		
			3 27 02 2.05 01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Dijamin Peredarannya		Jenis	6	100.000.000	6	100.000.000	6	200.000.000		
			3 27 02 2.05 02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Jumlah Benih dan Bibit Ternak yang Diuji Mutunya		Jenis	6	100.000.000	6	100.000.000	6	200.000.000		
			3 27 02 2.05 03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Diawasi Peredaran dan Sertifikasinya		Jenis	2	100.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 27 02 2.05 04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT dan Bahan Pakan/Pakan yang Dijamin Peredarannya		Jenis	6	100.000.000	6	100.000.000	6	200.000.000		
			3 27 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dikendalikan Penyediaannya		Jenis	4	100.000.000	4	100.000.000	4	200.000.000		
			3 27 02 2.05 06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Diawasi		Jenis	8	100.000.000	8	100.000.000	8	200.000.000		
			3 27 02 2.06	Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Lain	Jumlah Benih / Bibit Ternak yang Disediakan		Ekor	2.500	5.250.000.000	2.500	5.800.000.000	5.065	11.050.000.000		
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Disediakan		Kg	468.750				1.397.250			
			3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Ternak yang Disediakan		Ekor	2.500	5.000.000.000	2.500	5.500.000.000	5.065	10.500.000.000		
			3 27 02 2.06 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak		Kg	468.750	250.000.000	500.000	300.000.000	1.397.250	550.000.000		
			3 27 03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		- persen	100,00	9.950.000.000	100,00	5.250.000.000	100,00	15.200.000.000		
			3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dikembangkan			1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000		
			3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun		Unit	8	9.000.000.000	8	4.300.000.000	17	13.300.000.000		
			3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan / atau Dipelihara		Unit	2	200.000.000	2	200.000.000	4	400.000.000		
			3 27 03 2.02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan / atau Dipelihara		Unit	2	200.000.000	2	200.000.000	4	400.000.000		
			3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan / atau Dipelihara		Unit	2	250.000.000	2	250.000.000	4	500.000.000		
			3 27 03 2.02 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan / atau Dipelihara		Unit	1	6.000.000.000	1	2.600.000.000	1	8.600.000.000		
			3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan / atau Dipelihara		Unit	1	2.350.000.000	1	1.050.000.000	1	3.400.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
								TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								CAPAIAN	SATUAN	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 27 03 2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dikelola		Wilayah	2	250.000.000	2	250.000.000	4	500.000.000		
			3 27 03 2.03 01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilakukan Pelestarian dan Pemanfaatan		Wilayah	2	150.000.000	2	150.000.000	4	300.000.000		
			3 27 03 2.03 02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Diawasi		Wilayah	2	100.000.000	2	100.000.000	4	200.000.000		
			3 27 03 2.04	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Lokasi Lahan Pengembalaan Umum yang Dikembangkan		Lokasi	10	600.000.000	10	600.000.000	28	1.200.000.000		
			3 27 03 2.04 01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Lokasi Lahan Pengembalaan Umum yang Didentifikasi dan Ditetapkan		Lokasi	4	100.000.000	4	100.000.000	8	200.000.000		
			3 27 03 2.04 02	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Lokasi Lahan Pengembalaan Umum yang Dikelola		Lokasi	10	400.000.000	10	400.000.000	28	800.000.000		
			3 27 03 2.04 03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Lokasi Lahan Pengembalaan Umum yang Dibina dan Diawasi		Lokasi	18	100.000.000	30	100.000.000	30	200.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 27 06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan	-	persen	100,00	150.000.000	100,00	200.000.000	100,00	350.000.000		
			3 27 06 2.01	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan		Izin Usaha	10	100.000.000	10	100.000.000	30	200.000.000		
			3 27 06 2.01 01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Peternakan yang Disusun		Dokumen	1	25.000.000	-	-	1	25.000.000		
			3 27 06 2.01 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Unit Usaha Peternakan yang Diberi Penilaian Kelayakan dan Diberi Pertimbangan Teknis Izin Usaha		Unit Usaha	10	75.000.000	10	75.000.000	30	150.000.000		
			3 27 06 2.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Unit Usaha Peternakan yang Dibina dan Diawasi Penerapan Izin Usahanya		Unit Usaha	-	-	5	25.000.000	5	25.000.000		
			3 27 06 2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang Diterbitkan		Rekomendasi izin usaha	3	50.000.000	10	100.000.000	13	150.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 27 06 2.02 01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Proses Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		Proses Rekomendasi Izin Usaha	-	-	-	-	-	-		
			3 27 06 2.02 02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Unit Usaha yang Diawasi Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan		Unit Usaha	3	50.000.000	5	75.000.000	8	125.000.000		
			3 27 06 2.02 03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Unit Usaha yang Diawasi Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan		Unit Usaha	-	-	-	-	-	-		
			3 27 06 2.02 04	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Jumlah Unit Usaha yang Diawasi Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan		Unit Usaha	-	-	-	-	-	-		
			3 27 06 2.02 05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Unit Usaha yang Diawasi Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan		Unit Usaha	-	-	11	25.000.000	11	25.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
											TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											CAPAIAN	SATUAN	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3	27	06	2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang Diterbitkan		Unit Usaha	-	-	-	-	-	-		
			3	27	06	2.03	01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Layanan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan		Unit Usaha	-	-	-	-	-	-		
			3	27	06	2.03	02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Pengecer Obat Hewan yang Diawasi Pelaksanaan Izin Usahanya		Unit Usaha	-	-	-	-	-	-		
	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis							-	Persen	80,80	450.000.000	80,80	2.500.000.000	80,80	2.950.000.000		
			3	27	04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100	persen	100,00	350.000.000	100,0	2.300.000.000	100,00	2.650.000.000		
			3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaminan Kesehatan Hewan		Persen	100	175.000.000	100	400.000.000	100	575.000.000		
			3	27	04	2.01	01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan		Ekor	35.000	175.000.000	35.000	200.000.000	35.000	375.000.000		
			3	27	04	2.01	02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penyakit		Jenis	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 27 04 2.01 03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Lokasi		Lokasi	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000		
			3 27 04 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		Persen	-	-	100	250.000.000	100	250.000.000		
			3 27 04 2.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Dokumen Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan		Dokumen	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000		
			3 27 04 2.02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis		Kali	-	-	10	50.000.000	10	50.000.000		
			3 27 04 2.02 03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang Diperiksa di Perbatasan		Ekor	-	-	500	150.000.000	500	150.000.000		
			3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner		Persen	100	-	100	1.270.000.000	100	1.270.000.000		
			3 27 04 2.03 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium		Unit	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000		
			3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Unit	-	-	1	1.170.000.000	1	1.170.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis		Unit	10	175.000.000	10	280.000.000	30	455.000.000		
					Jumlah Unit Usaha yang Diawasi		Unit	10		10		30	-		
			3 27 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang Didampingi		Unit	5	25.000.000	10	50.000.000	25	75.000.000		
			3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Hewan dan Produk Hewan		Kali	20	75.000.000	20	100.000.000	20	175.000.000		
			3 27 04 2.04 03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah Dokumen Persyaratan Teknis yang Ditetapkan		Dokumen	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000		
			3 27 04 2.04 04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sample PAH yang Diuji		Sample	50	75.000.000	50	80.000.000	50	155.000.000		
			3 27 04 2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis		Unit	-	-	5	100.000.000	5	100.000.000		
					Jumlah Unit Usaha yang Diawasi		Unit	-	-	5		5			
			3 27 04 2.05 01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Unit Usaha yang Didampingi		Unit	-	-	5	50.000.000	5	50.000.000		
			3 27 04 2.05 02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran yang Ditangani		Penanganan	-	-	5	50.000.000	5	50.000.000		
			3 27 05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan dan Kesehatan Hewan		- persen	100,00	100.000.000	100,00	200.000.000	100,00	300.000.000		
			3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Kali	1	100.000.000	1	200.000.000	2	300.000.000		
			3 27 05 2.01 01	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Penanggulangan Bencana Non Alam		Kali	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			3 27 05 2.01 05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana		Kali	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000		
			X XX 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	100,00	13.216.299.124	100,00	14.711.711.379	100,00	27.928.010.503	27.928.010.503	
			X XX 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33	dokumen	33	105.000.000	33	116.000.000	33	221.000.000		
			X XX 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	5	35.000.000	5	37.000.000	5	72.000.000		
			X XX 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	10	10.000.000	5	12.000.000	5	22.000.000		
			X XX 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	5	-	5	-	5	-		
			X XX 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	5	10.000.000	5	12.000.000	5	22.000.000		
			X XX 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	5	-	5	-	5	-		
			X XX 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	8	laporan	8	50.000.000	8	55.000.000	8	105.000.000		
			X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	laporan	12	9.918.879.436	12	10.911.767.379	12	20.830.646.815		
			X XX 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	laporan	12	9.888.879.436	12	10.877.767.379	12	20.766.646.815		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			X XX 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		12	10.000.000	12	12.000.000	12	22.000.000		
			X XX 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD	12	laporan	12	20.000.000	12	22.000.000	12	42.000.000		
					Laporan Tanggapan Pemeriksaan	-	laporan	2		2		2	-		
			X XX 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	2	50.000.000		
			X XX 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000		
			X XX 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	-	bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	20.000.000		
			X XX 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	20.000.000		
			X XX 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12	laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	30.000.000		
			X XX 01 2.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000		
			X XX 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	10.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI
									PADA TAHUN AWAL		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR			
									CAPAIAN	SATUAN	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			X	XX	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	laporan	1	238.880.000	1	382.187.500	1	621.067.500		
			X	XX	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	paket	-	-	1	82.687.500	1	82.687.500		
			X	XX	01	2.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian		laporan	2	9.500.000	2	9.500.000	2	19.000.000		
			X	XX	01	2.05	06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Laporan Pemulangan Pegawai yang pensiun	-	orang	3	18.000.000	5	35.000.000	8	53.000.000		
			X	XX	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	orang	6	169.380.000	7	210.000.000	13	379.380.000		
			X	XX	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	50	42.000.000	50	45.000.000	50	87.000.000		
			X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	laporan	12	790.846.875	12	847.125.000	12	1.637.971.875		
			X	XX	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	laporan	12	318.346.875	12	335.000.000	12	653.346.875		
			X	XX	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	laporan	12	63.000.000	12	66.150.000	12	129.150.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			X XX 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	laporan	12	42.000.000	12	44.100.000	12	86.100.000		
			X XX 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	laporan	12	30.000.000	12	31.500.000	12	61.500.000		
			X XX 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	157.500.000	12	165.375.000	12	322.875.000		
			X XX 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	10.000.000		
			X XX 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	laporan	1	175.000.000	1	200.000.000	2	375.000.000		
			X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Laporan	1	532.500.000	1	770.375.000	2	1.302.875.000		
			X XX 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	unit	-	-	-	-	-	-		
			X XX 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	unit	1	275.000.000	1	300.000.000	2	575.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI
						PADA TAHUN AWAL		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR			
						CAPAIAN	SATUAN	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			X XX 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	-	paket	1	205.000.000	1	215.250.000	2	420.250.000		
			X XX 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	unit	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000		
			X XX 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	unit	1	52.500.000	1	55.125.000	2	107.625.000		
			X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Laporan	12	946.637.813	12	976.000.000	12	1.922.637.813		
			X XX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12	Laporan	12	134.284.500	12	141.000.000	12	275.284.500		
			X XX 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	12	42.353.313	12	45.000.000	12	87.353.313		
			X XX 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	12	770.000.000	12	790.000.000	12	1.560.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI
						CAPAIAN	SATUAN	TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR			
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Laporan	12	643.555.000	12	668.256.500	12	1.311.811.500		
			X XX 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Laporan	12	365.400.000	12	383.670.000	24	749.070.000		
			X XX 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Laporan	1	26.250.000	1	27.562.500	2	53.812.500		
			X XX 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Laporan	1	225.025.000	1	228.800.000	2	453.825.000		
			X XX 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Laporan	1	26.880.000	1	28.224.000	2	55.104.000		
									35.391.299.124		34.391.711.379		69.783.010.503		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan perikanan dan peternakan sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan yang Mengacu pada Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	
1	Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap	-	100	100	100	100
2	Cakupan Kelestarian Sumberdaya Perikanan di Perairan Umum	100	100	100	100	100
3	Cakupan Pengelolaan Perikanan Budidaya	-	100	100	100	100
4	Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	100	100	100	100
5	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	100	100	100	100
6	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	100	100	100	100
7	Cakupan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan	-	100	100	100	100
8	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100	100	100	100	100
9	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	100	100	100	100
10	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100

Indikator kinerja tersebut di atas disusun berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya dan ditujukan untuk mendukung pencapaian target Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama), yaitu mendukung Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, Persentase peningkatan produktivitas peternakan, dan Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Perikanan dan Peternakan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi :

- a. Seluruh unit OPD, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* OPD berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. OPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) setiap tahun;
- c. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Perubahan Renstra dengan Renja OPD.